

# SENATOR



ISSN 2978-3118

ISSN 2987-3118



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI II / MARET 2025

## KHUSUS

Banjir di Mana-mana  
Ketua DPD RI Beri Bantuan Korban Banjir Bekasi

14

## NUSANTARA

Danantara Perlu Perluas  
Pelayanan Hingga Daerah

20

# DPD RI SIAP Berkolaborasi dengan Kepala Daerah Baru



Akses  
MAJALAH SENATOR  
Versi Digital  
Dewan Daerah Republik Indonesia

## VARIA SENAT

Pelaksanaan Reforma Agraria  
Timbulkan Konflik Pertanahan

37

## SETJEN

Fokus Garda Terdepan  
Menjaga Kinerja DPD RI

49



# Menimbang Pemilihan Gubernur oleh DPRD

Wacana pengembalian pemilihan gubernur ke DPRD kembali mencuat setelah Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, mengusulkan agar kepala daerah tingkat provinsi dipilih secara tidak langsung. Gagasan ini bukan tanpa alasan, mengingat gubernur tidak hanya berperan sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Pakar pemerintahan dan otonomi daerah, Djohermansyah Djohan, turut menguatkan argumen ini, dengan menyoroti bahwa pemilihan langsung di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota selama ini menelan biaya politik yang sangat tinggi.

Fenomena politik uang dalam pilkada langsung telah menjadi rahasia umum. Seorang calon gubernur bisa menghabiskan dana lebih dari Rp50 miliar untuk proses pencalonan hingga kampanye, sementara pasangan calon bupati atau wali kota bisa mengeluarkan lebih dari Rp20 miliar. Dengan biaya sebesar itu, muncul kekhawatiran bahwa kepala daerah yang terpilih akan lebih fokus pada pengembalian modal ketimbang mengabdikan kepada rakyat. Ditambah lagi, praktik "serangan fajar" dan politik transaksional semakin memperburuk kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Namun, mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD juga bukan tanpa risiko. Publik bisa melihatnya sebagai kemunduran demokrasi (*setback*) yang membuka peluang lebih besar bagi praktik oligarki politik dan transaksi jabatan. Sistem pemilihan di DPRD berpotensi melanggengkan politik dinasti dan menjauhkan rakyat dari hak pilihnya. Padahal, semangat reformasi menghendaki keterlibatan langsung masyarakat

dalam menentukan pemimpinnya.

Karena itu, solusi yang lebih moderat perlu dikaji. Jika pilkada langsung tetap dipertahankan, maka perlu pembenahan sistem yang lebih ketat, seperti pembatasan belanja kampanye, transparansi dana politik, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik politik uang. Sanksi berat harus diberikan kepada kandidat yang terbukti melakukan transaksi politik dengan pemilih. Selain itu, negara juga perlu memperkuat peran partai politik dalam menyiapkan kader-kader terbaik agar pilkada tidak sekadar menjadi ajang bagi pemilik modal besar.

Alternatif lainnya adalah menerapkan pemilihan gubernur oleh DPRD, tetapi dengan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satunya, dengan membuka proses seleksi calon ke publik, melibatkan akademisi, lembaga independen, serta masyarakat sipil dalam uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Dengan cara ini, pemilihan tidak hanya mengandalkan lobi politik di DPRD, tetapi tetap melibatkan aspirasi publik secara tidak langsung.

Pada akhirnya, pilihan sistem pemilihan kepala daerah harus mempertimbangkan keseimbangan antara efektifitas pemerintahan dan kualitas demokrasi. Jika pemilihan langsung terus melahirkan kepala daerah "berduit" yang lebih sibuk mengembalikan modal, maka sudah saatnya mekanisme baru dipertimbangkan. Namun, solusi yang ditawarkan harus tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan keterwakilan rakyat, agar demokrasi tidak hanya menjadi sekadar prosedural, tetapi juga substantif dan bermakna bagi masyarakat. (\* /Lela Sa'diah)

## SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

**PENASEHAT:** Rahman Hadi, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **PENANGGUNGJAWAB:** Mahyu Darma  
**PEMIMPIN REDAKSI:** Heru Firdan; **REDAKTUR PELAKSANA:** Budi Fitra Helmi; **REDAKTUR FOTO & GRAFIS:** Agus Wiharto; **EDITOR SENIOR:** Intan Fitria Yuliani, Arso P Nugroho; **DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER:** Subbagian Media Setjen DPD RI; **TIM PENULIS ARTIKEL:** Heru Firdan, Budi Fitra Helmi, Intan Fitria Yuliani, Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Muhamad Fathoni, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Didin Saputra, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Nanda Russia Rola, Adhi Nugroho, Lela Sadiyah

### KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1 Gedung B DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6 Jakarta Pusat 10270. Email : keranjangsenator@gmail.com Kotak Saran : majalah\_senator@dpd.go.id // website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri

# Reviewing Gubernatorial Election by DPRD

The idea to return gubernatorial election to the Regional Legislative Councils (DPRD) recurs after The Chairman of the House of Regional Representatives (DPD RI), Sultan B Najamudin, suggests that regional heads for provincial level are not to be directly elected. The idea is not without reason, remembering that a governor is not only serving as head of the region, but he is also the extended hand of the central government in the regions. Expert of government administration and regional autonomy, Djohermansyah Djohan, supports the argumentation, exposing that direct election at both provincial level and city/district level so far have incurred a very high political cost

Money politic phenomena in direct regional head election (Pilkada) have become a public secret. A governor candidate could spend more than Rp.50 billion for candidacy and campaign process, while a candidate pair of regent or mayor could incur more than Rp.20 billion. With such a huge expenditure does a concern arise that a regional head elect will rather focus on the return on investment than serving the people. Besides, 'dawn invasion' practice and transactional politics have degraded the quality of democracy at regional level.

Nevertheless, reverting regional head election to DPRD is not risk-free either. Public can deem it as a democracy setback that opens a bigger possibility to political oligarchy practices and positional transactions. Election system in DPRD potentially perpetuates dynasty politics and distances the people from their voting right. As a matter of fact, reformation spirit demands direct

involvement of society in voting for their leaders.

Therefore, a more moderate solution needs to be reviewed. Should a direct election be kept, it is of necessity to rectify the system into a tighter one, such as a limitation to campaign expenditure, a transparency of political funds, a sterner law enforcement against money politics. A severe penalty should be imposed on a candidate who is caught red-handed committing money politics with the voters. In addition, the state also needs to empower the role of political parties in preparing their best cadres in order to avoid turning regional head election into a competition platform for big investors.

Another alternative is to implement gubernatorial election by DPRD with a more transparent and accountable mechanism. Among others, it is to disclose candidate selection process to public by involving academics, independent institutions, and civil communities during his/her fit and proper test. Under such mechanism will the election not only rely on political lobby in DPRD but it will also involve public aspiration indirectly.

Eventually, the selection of regional head election system should consider the balance between the government effectiveness and the quality of democracy. If direct election keeps producing "rich" regional heads who are more prone to get busy for the return on investment, it is a high time to consider a new mechanism. Nonetheless, the solution introduced should keep the principle of accountability and people representation in order not to plunge democracy into a mere procedure, rather a substantive and beneficial matters to the society. **(Lela Sa'diah)**



# DPD RI SIAP BERKOLABORASI DENGAN KEPALA DAERAH BARU

Presiden Prabowo Subianto melantik kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota) hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). Mereka yang dilantik terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.



Para kepala daerah dan wakil kepala daerah saat mengikuti pelantikan di Istana Kepresidenan. (Foto Indonesia.go.id)

**Theresia Oktavina**

Penulis

**D**engan telah dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada 2024 itu, tentu saja membawa harapan bagi masyarakat di daerah yang dipimpinnya. Bahkan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pun menaruh harapan kepada kepala daerah yang dilantik, yaitu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.

“Esensi perjuangan politik DPD RI adalah sebagai alat politik pemerintah daerah dan masyarakat daerah. Sehingga kami pastikan semua anggota DPD RI siap berkolaborasi dengan para kepala daerah, baik gubernur, maupun bupati dan wali kota yang baru saja dilantik,” kata Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, usai

“**Esensi perjuangan politik DPD RI adalah sebagai alat politik pemerintah daerah dan masyarakat daerah. Sehingga kami pastikan semua anggota DPD RI siap berkolaborasi dengan para kepala daerah, baik gubernur, maupun bupati dan wali kota yang baru saja dilantik.**”

**Ketua DPD RI,  
Sultan B Najamudin**

menghadiri acara pelantikan kepala daerah tersebut.

Secara kelembagaan, DPD RI memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang juga bisa dijadikan instrumen politik untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah. DPD RI periode kali ini ingin fokus

memberikan pertimbangan dan pengawasan pada hal-hal yang terkait dengan otonomi daerah, sesuai Pasal 22D dan 22E UUD 1945.

“Sehingga, kami ingin posisi dan peran DPD RI dipertegas dan diperjelas dalam mendukung pembangunan di daerah. DPD RI adalah jembatan aspirasi politik pemda dan merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan anggaran transfer pusat ke daerah (TKD),” kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Sultan menilai pelantikan kepala daerah yang langsung dilakukan oleh Presiden di Istana Kepresidenan merupakan sejarah baru. Hal ini menunjukkan adanya keinginan politik Presiden Prabowo untuk menghimpun semua kekuatan nasional di daerah untuk berkolaborasi, bergotong royong menyukseskan semua program pemerintah. (\*)

# Kepala Daerah Harus Sejalan dengan Pusat

Betria Eriani

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar), Irman Gusman, menekankan pentingnya sinergi antara pemimpin baru di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kepala daerah yang baru dilantik harus memiliki visi yang sejalan dengan pemerintah pusat.

Dikutip dalam Podcast GDM 62 bertema “Membaca Arah Indonesia di Tangan Pemimpin Baru dan Kepala Daerah Baru”, Kamis (27/2/2025), Irman mencontohkan *diaspora investment* sebagai strategi potensial untuk memperkuat ekonomi Indonesia, sebagaimana dilakukan konglomerat Malaysia yang sukses menggandeng investor barat.

Irman mengingatkan, setelah dilantik, pejabat publik harus mengutamakan loyalitas kepada negara, bukan kepada partai. Ia mengutip pernyataan Presiden AS John F. Kennedy yang menyatakan bahwa setelah pemilihan usai, kepentingan negara harus menjadi prioritas utama. “Tidak boleh lagi ada perbedaan visi setelah terpilih. Gubernur, bupati, dan wali kota harus memiliki visi-misi yang sama dengan pemerintah pusat,” tegasnya.



Anggota DPD RI Irman Gusman.

“**Tidak boleh lagi ada perbedaan visi setelah terpilih. Gubernur, bupati, dan wali kota harus memiliki visi-misi yang sama dengan pemerintah pusat.**”

Anggota DPD RI,  
Irman Gusman

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, semua pihak harus berkontribusi menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pendapatan per kapita 15-20 ribu dolar dan menempatkan GDP Indonesia di peringkat keempat dunia setelah Tiongkok, Amerika, dan India. Apa yang dicanangkan pemerintah pusat,

seperti target pertumbuhan ekonomi 8 persen, penyediaan makanan bergizi gratis, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan pengangguran, harus diterapkan di daerah.

Sebagai senator dari Sumatera Barat, Irman juga menyoroti kekhususan Sumbar yang berlandaskan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandikan Kitabullah”. Ia menegaskan bahwa kebijakan di Sumbar harus tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin, agar pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan.

“Penerjemahan nilai-nilai ini dalam kebijakan politik dan ekonomi harus dilakukan dengan tepat,” kata Irman Gusman, yang menjadi Ketua DPD RI selama tujuh tahun (2009-2016) dan Wakil Ketua DPD RI periode 2004-2009. (\*).



# Kolaborasi Kunci Utama Wujudkan Pembangunan



Anggota DPD RI Andi Ian Ali Baal Masdar.

**Arso P. Nugroho**

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Sulawesi Barat, Andi Ian Ali Baal Masdar, menekankan bahwa kolaborasi yang erat antara semua pihak merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di provinsi daerah pemilihannya itu.

“Tantangan pembangunan di Sulawesi Barat tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, sehingga saya berharap para kepala daerah yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan visi yang jelas, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, serta membangun kerja sama yang

“**Mari kita bersatu, bekerja bersama, dan memberikan kontribusi nyata untuk membangun daerah yang lebih baik.**”

**Anggota DPD RI,  
Andi Ian Ali  
Baal Masdar**

solid dengan berbagai pihak,” ujarnya, Rabu (26/2/2025).

Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan legislatif akan mempercepat terwujudnya program pembangunan yang inklusif serta berdampak nyata bagi masyarakat. Keterlibatan aktif dari masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya

juga sangat diperlukan untuk menciptakan solusi inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan. Hanya dengan kolaborasi yang kuat, Sulawesi Barat dapat berkembang menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Sebagai perwakilan Sulawesi Barat di tingkat nasional, Andi Ian Ali Baal Masdar akan mengawal kepentingan daerah dalam kebijakan-kebijakan strategis di tingkat pusat. “Saya siap menjadi jembatan komunikasi antara daerah dan pemerintah pusat agar Sulawesi Barat mendapatkan perhatian yang maksimal dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” ungkapnya.

Dengan semangat kebersamaan, Andi Ian Ali Baal Masdar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam mendukung kepemimpinan daerah yang baru. “Mari kita bersatu, bekerja bersama, dan memberikan kontribusi nyata untuk membangun daerah yang lebih baik,” katanya.

Dalam pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, termasuk pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, serta Bupati Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah. (\*)

# Senator Dukung Program Pendidikan Gratis di PBD

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Salah satu pasangan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2024 yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, pada 20 Februari 2025 adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau.

Salah satu program jangka pendek yang harus segera dilaksanakan oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu adalah pendidikan gratis, selain menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen tersebut mendapat dukungan positif dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Paul Finsen Mayor.

Pendidikan gratis yang digagas oleh Gubernur Elisa Kambu selaras dengan gagasan yang selama ini didorong oleh Paul Finsen Mayor. “Program pendidikan gratis yang digagas oleh gubernur merupakan suatu gagasan yang mulia. Saya selaku anggota DPD RI sudah mendukung pendidikan gratis ini di Jakarta,” ujar Paul Finsen Mayor usai menghadiri acarapisah



Anggota DPD RI Paul Finsen Mayor

sambut Penjabat Gubernur Papua Barat Daya kepada Gubernur Papua Barat Daya di Sorong, Kamis (6/3/2025).

Sebagai senator dari Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor mendukung sepenuhnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah untuk kemajuan pembangunan di daerah. Menurutnya program pendidikan gratis ini menjadi solusi terbaik dalam menghadapi penolakan masyarakat di Tanah Papua terhadap program MBG yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

“Program pendidikan gratis ini menjadi solusi yang sangat bagus untuk peningkatan SDM. Karena orang harus mendapatkan

pendidikan gratis dulu, baru bisa pergi sekolah dan mendapat makan bergizi gratis di sekolah. Itu yang saya beri apresiasi kepada Gubernur Papua Barat Daya,” kata Senator Paul.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan bahwa program pendidikan gratis harus mencakup semua jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA atau SMK. Program ini berlaku di semua sekolah, baik negeri maupun swasta. “Saya tidak mau tahu. TK, SD, SMP, dan SMA atau SMK gratis. Tidak boleh lagi ada yang membayar uang pendaftaran dan pembangunan. Tidak boleh ada diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta,” tegas Elisa Kambu. (\*)



# Senator TGH Ibnu Halil Dukung Penuh Iqbal-Dinda

Adhi Nugroho

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Ibnu Halil, menyatakan dukungannya secara penuh kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2025-2030, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 20 Februari 2025.

“Saya menyampaikan ucapan selamat kepada gubernur dan wakil gubernur yang baru. Siapa pun pemimpin yang terpilih harus kita dukung sepenuhnya, terutama jika program-program yang dijalankan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat NTB,” ujar Ibnu Halil, Rabu (5/3/2025).

Ia menekankan bahwa pemimpin yang terpilih harus mendapatkan dukungan penuh. Sebelumnya, dalam Pilkada 2024, TGH Ibnu Halil sempat menyuarakan dukungan kepada pasangan calon Zulkieflimansyah dan M. Suhaili atau Zul-Uhel. Namun, ia juga pernah menyatakan dukungannya kepada pasangan Iqbal-Dinda.

TGH Ibnu Halil meyakini bahwa pengalaman luas



Anggota DPD RI TGH Ibnu Halil.

“**Saya menyampaikan ucapan selamat kepada gubernur dan wakil gubernur yang baru. Siapa pun pemimpin yang terpilih harus kita dukung sepenuhnya, terutama jika program-program yang dijalankan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat NTB.**”

Anggota DPD RI,  
TGH Ibnu Halil

Iqbal, baik di birokrasi maupun di kancah internasional, akan menjadi modal besar bagi kemajuan NTB. Ia juga mengapresiasi langkah cepat Iqbal yang telah melakukan

pertemuan dengan berbagai tokoh nasional serta kunjungannya ke sejumlah kementerian sebelum resmi dilantik.

“Ini adalah sinyal positif bagi masa depan NTB. Gerak cepat ini akan memperkuat komunikasi dan mempercepat realisasi program strategis di NTB. Semoga kepemimpinan Iqbal-Dinda membawa keberkahan dan kemajuan bagi masyarakat NTB,” katanya.

Ibnu Halil pun menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintahan baru demi pembangunan yang lebih optimal. “Kami di DPD RI siap berkolaborasi, menghubungkan program-program pusat dengan daerah agar NTB bisa meraih manfaat maksimal dari kebijakan nasional,” katanya. (\*)

# Kebijakan Gubernur Aceh: Aktivitas Dihentikan Saat Azan

Mas Aryo Kritiyanto

Penulis

Beberapa hari setelah dilantik sebagai Gubernur Aceh, Muzakir Manaf meminta masyarakat Aceh untuk menghentikan segala aktivitas ketika azan berkumandang dan mengajak warga untuk menunaikan solat. Kebijakan tersebut disampaikan Mualem—sapaan Muzakir Manaf—dalam sambutannya sebelum melaksanakan solat Tarawih di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Selasa (4/3/2025).

Anggota DPD RI asal Aceh, Tgk Ahmada MZ, sangat mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, sudah seharusnya umat Islam menghentikan segala aktivitasnya ketika azan berkumandang dan menunaikan solat. “Gagasan ini perlu kita dukung bersama. Ini sebuah kebijakan yang baik untuk daerah dan umat,” kata Tgk Ahmada, dikutip dari Serambi, Kamis (6/3/2025).

Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh harus menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan dapat diterapkan di seluruh wilayah, termasuk oleh



Anggota DPD RI Tgk Ahmada.

pemerintah di tingkat gampong (desa) hingga keuchik (kepala desa).

Tgk Ahmada menegaskan bahwa pelaksanaan syariat Islam harus menjadi tanggung jawab bersama agar dapat berjalan secara kaffah (menyeluruh). Pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif dalam menegakkan perintah Allah. “Ketika azan berkumandang, kaum laki-laki seharusnya segera pergi ke masjid untuk solat berjamaah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang hanya menutup warung kopi saat azan, tetapi tidak ikut melaksanakan solat. “Selama ini, warkop-warkop memang tutup saat azan berkumandang, tapi orang-orang di dalamnya tetap tidak solat. Ini sama saja menipu diri

sendiri. Kita tidak ingin masyarakat baru ke masjid ketika ada razia atau ketika dipaksa. Ini ibadah untuk diri sendiri. Karena itu, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk saling mengingatkan,” tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa dirinya sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab besar terhadap warga Aceh, khususnya dalam menjalankan syariat Islam secara kaffah di Tanah Rencong. “Ke depan, kita akan memaksakan orang Aceh untuk solat. Ta paksa seumayang, nyoe tugas geu tanyoe (Kita paksa solat, ini tugas kita). Setiap pemimpin memiliki tugasnya masing-masing, minimal sebagai pemimpin dalam keluarga,” tuturnya. (\*)

# Gubernur Baru Akan Bawa Perubahan Positif di Maluku

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Maluku, Bisri Asshidiq Latuconsina—yang akrab disapa Boy—optimistis bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang baru, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, akan membawa perubahan positif bagi daerahnya.

“Memang ada banyak kendala dan keterbatasan. Namun, sebagai anak Maluku, saya perlu me-nyampaikan rasa optimisme saya yang luar biasa atas semangat kolaborasi kedua anak adat Maluku ini untuk memajukan daerah kita,” kata Boy usai menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Perdana Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Gedung DPRD Maluku, Rabu (5/3/2025).

Senator Boy menilai bahwa keinginan Gubernur Hendrik Lewerissa untuk menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan merupakan fondasi yang baik bagi pembangunan Maluku. Sebab, birokrasi adalah elemen utama dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

“Modal utama dari kepe-



Anggota DPD RI Bisri Asshidiq Latuconsina

“**Memang ada banyak kendala dan keterbatasan. Namun, sebagai anak Maluku, saya perlu menyampaikan rasa optimisme saya yang luar biasa atas semangat kolaborasi kedua anak adat Maluku ini untuk memajukan daerah kita.**”

Anggota DPD RI,  
Bisri Asshidiq  
Latuconsina

mimpinan ini adalah SKPD. Namun, proses meritokrasi yang nantinya akan diterapkan harus diawasi dengan ketat. Jangan sampai terjebak dalam euforia tim sukses atau

kelompok yang menilai seseorang berdasarkan faktor like and dislike,” tegasnya.

Mantan Ketua KNPI Provinsi Maluku ini juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath dari parlemen Senayan. Ia siap berkolaborasi agar pembangunan Maluku dapat berjalan sesuai harapan yang telah disampaikan dalam pidato perdana Gubernur Maluku.

Dalam Pilkada Gubernur Maluku, pasangan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath meraih 43.379 suara atau 47,4 persen, unggul dengan selisih yang cukup jauh dari dua pasangan calon lainnya. Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra, Perindo, dan PPP. (\*)

# Tiga Agenda Utama Gubernur Papua Tengah

Helena AF Ojan

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Papua Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo, menegaskan dukungannya terhadap tiga agenda utama yang akan dijalankan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah periode 2025-2030, Meki Fritz Nawipa dan Deinas Geley.

“Ada tiga agenda penting yang disampaikan oleh Pak Gubernur Papua Tengah, yaitu sosialisasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, program sekolah gratis, dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Papua Tengah. Menurut saya, ketiga hal ini sangat mendesak dan harus segera direalisasikan. Sebagai senator asal Papua Tengah, kami memberikan dukungan penuh,” ujar Eka Yeimo, dikutip dari Odiyaiwuu.com, Sabtu (22/2/2025).

Anggota Komite IV DPD RI dan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) ini mengapresiasi perhatian Gubernur Meki Nawipa terhadap tiga agenda tersebut. Menurutnya, ketiga program ini sangat relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah Meepago, Papua Tengah.

“Saya juga mengusulkan



Anggota DPD RI Eka Kristina Murib Yeimo saat menghadiri ramah tamah bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah. (Foto Odiyaiwuu.com)

agar sosialisasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dilakukan oleh Majelis Rakyat Provinsi (MRP) Papua Tengah sebagai representasi kultural masyarakat asli Papua. Saya berharap semua program yang disampaikan dapat berjalan lancar dengan penyertaan Tuhan,” ungkap senator lulusan Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini.

Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, secara resmi melantik Meki Nawipa dan Deinas Geley bersama 961 kepala daerah lainnya—terdiri dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota hasil Pilkada 2024—di Istana Merdeka, Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

“Atas nama negara dan bangsa Indonesia, saudara

dipilih untuk menjadi pelayan rakyat, abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat dan berjuang demi perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita,” ujar Presiden Prabowo Subianto dalam amanat pelantikannya.

Usai pelantikan, Meki Nawipa dan Deinas Geley menggelar syukuran bersama masyarakat Papua Tengah di Jakarta pada hari yang sama. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk. Turut hadir anggota DPR dan DPD RI asal Papua Tengah, perwakilan Forkopimda Papua Tengah, serta pimpinan partai politik. (\*)



# Infrastruktur Harus Jadi Prioritas di Papua Selatan

Nanda Russia Rola

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sularso, menekankan bahwa infrastruktur harus menjadi salah satu sektor prioritas yang dipercepat pembangunannya di Provinsi Papua Selatan. Percepatan pembangunan ini sangat penting mengingat Papua Selatan masih minim infrastruktur, terutama fasilitas perkantoran, jalan, dan jembatan.

Sularso menyebut bahwa pembangunan di Papua Selatan harus dilakukan secara paralel antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Selain itu, sektor kesehatan dan pendidikan sebagai urusan wajib, serta visi dan misi gubernur dan wakil gubernur, harus menjadi fokus utama pemerintah.

“Bukan hanya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, tetapi juga pemerintah pusat harus turut serta dalam percepatan pembangunan di daerah otonom baru ini. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk bersinergi dan terus membangun komunikasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat,” ujar Sularso, dikutip dari rri.co.id, Kamis (20/2/2025).

“Bukan hanya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, tetapi juga pemerintah pusat harus turut serta dalam percepatan pembangunan di daerah otonom baru ini. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk bersinergi dan terus membangun komunikasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.”

Anggota DPD RI,  
Sularso

Sularso juga menekankan bahwa kerja sama antar-pemerintah harus sejalan dengan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan, salah satunya di bidang ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan bukan hanya kepentingan nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, ia menyarankan agar program strategis ini dijalankan dengan baik dan melibatkan semua pihak, tanpa mengurangi hak-hak masyarakat Papua Selatan.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo

Subianto melantik secara serentak para kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Istana Kepresidenan pada Rabu (20/2/2025). Di antara mereka yang dilantik adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo dan Paskalis Imadawa.

Selain itu, tiga bupati dan wakil bupati di Papua Selatan juga resmi dilantik, yaitu: Bupati dan Wakil Bupati Merauke: Yosep Gebze dan Fauzun Nihayah, Bupati dan Wakil Bupati Mappi: Kristosimus Johanis Agawemu dan Sanusi, Bupati dan Wakil Bupati Asmat: Thomas Safanpo dan Yoel Manggaprou (\*)



Wawancara Ketua DPD RI Tentang Wacana Pemilihan Gubernur Tidak Langsung:

# Ada Potensi Disharmoni Pusat dan Daerah

Rini Sumarni

Penulis

**K**etua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, mengusulkan wacana pemilihan gubernur secara tidak langsung. Menurutnya, gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, sehingga mekanisme pemilihannya perlu dikaji ulang. Berikut petikan wawancara dengan Sultan B Najamudin usai menghadiri pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Istana Kepresidenan, Rabu (20/2/2025).

**Anda mengusulkan agar gubernur tidak lagi dipilih secara langsung. Apa alasan utama dari gagasan ini?**

Secara empiris, jabatan gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial, sehingga gubernur memiliki peran strategis dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan di kabupaten/kota. Dengan posisi ini, tentu lebih relevan jika mekanisme pemilihannya dikaji ulang agar lebih sesuai dengan sistem pemerintahan yang kita anut.

**Apa kekhawatiran Anda jika gubernur tetap dipilih langsung oleh rakyat?**

Saya melihat bahwa ada potensi disharmoni antara pemerintah pusat dan daerah jika gubernur memiliki afiliasi politik yang berbeda dengan presiden. Jangan sampai karena perbedaan politik, ada gubernur yang tidak mendukung kebijakan pusat dan justru menghambat program pembangunan nasional. Kita butuh gubernur yang bisa benar-benar merepresentasikan kepentingan nasional dan memastikan jalannya pemerintahan di daerah sejalan dengan kebijakan pusat.

**Seperti apa mekanisme pemilihan gubernur yang Anda usulkan?**

Pemilihan gubernur bisa dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD provinsi. Mekanismenya



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat menghadiri pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Istana Kepresidenan. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

bisa dilakukan secara berjenjang, mulai dari proses rekrutmen, uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), lalu nama-nama calon diusulkan ke Presiden untuk menetapkan gubernur dan wakil gubernur. Dengan cara ini, prosesnya lebih efisien dan sederhana dibandingkan pemilihan langsung.

**Apakah ini sudah menjadi sikap resmi DPD RI?**

Ini murni pendapat pribadi saya. Saya menyadari bahwa wacana ini pasti akan memicu perdebatan. Namun, saya ingin mengajak akademisi, partai politik, pemerintah, dan masyarakat untuk mendiskusikan ini secara lebih terbuka. Lagipula, jadwal Pilkada masih lima tahun lagi, jadi masih ada waktu untuk mendesain sistem yang lebih baik.

**Anda menyebut sudah menuliskan gagasan ini dalam buku. Bisa dijelaskan lebih lanjut?**

Ya, saya sudah membahasnya dalam buku *Green Democracy*. Dalam buku itu, saya menyoroti bagaimana demokrasi kita bisa lebih efisien tanpa menghilangkan esensi partisipasi masyarakat. Saya kira ini bisa menjadi bahan kajian bersama untuk memperbaiki sistem demokrasi lokal kita.

**Bagaimana tanggapan Anda jika masyarakat menolak wacana ini?**

Saya menghormati setiap pendapat dan pro-kontra yang muncul. Demokrasi kita memang dinamis, dan setiap gagasan harus dikaji dengan terbuka. Saya hanya ingin memberikan perspektif lain agar sistem pemerintahan kita bisa lebih baik ke depannya. (\*)

# BANJIR DI MANA-MANA

## Ketua DPD RI Beri Bantuan Korban Banjir Bekasi

Sejak beberapa waktu belakangan ini, sejumlah daerah dilanda bencana banjir. Yang menyedot perhatian publik adalah banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin memberikan bantuan buat korban banjir di kota penyangga Jakarta itu.

**M. Fathoni**

Penulis

**B**antuan itu berupa barang-barang kebutuhan mendesak yang disesuaikan dengan informasi langsung dari warga terdampak, seperti serokan lantai berkaret, alat pel, cairan pembersih lantai, sepatu bot, ember kecil, dan disinfektan. Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan kepada Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe di Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir Kota Bekasi, Kamis (6/3/2025). Penyerahan bantuan itu juga dihadiri Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai dan anggota DPD RI dari dapil Jawa Barat Aanya Rina Casmayanti. “Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas DPD RI terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana banjir,”



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai dan para anggota DPD RI menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

kata Sultan.

Adapun barang-barang yang diserahkan terdiri dari serokan lantai berkaret, alat pel, cairan pembersih lantai, sepatu bot, ember kecil, dan disinfektan. Sultan berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga dan membantu proses pembersihan serta pemulihan pasca-banjir. Sultan menegaskan bahwa DPD RI siap mendukung upaya penanganan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat.

Sultan Najamudin juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyaluran bantuan ini. “Kami berharap bantuan ini dapat memberikan sedikit kelegaan bagi warga yang terdampak banjir. Kami juga mengimbau semua

pihak untuk terus bersinergi dalam upaya penanganan bencana dan pencegahan dampak yang lebih besar di masa depan,” ujarnya.

Menurut mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, DPD RI berharap bantuan yang diberikan itu dapat menjadi langkah awal dalam memulihkan kondisi warga Kota Bekasi dan mendorong upaya pemulihan yang lebih komprehensif di masa mendatang.

Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh DPD RI. “Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami yang sedang membutuhkan. Kami berkomitmen untuk mendistribusikan bantuan ini secara merata dan tepat sasaran,” ucap Abdul Harris. (\*)

# Picu Banjir di Jabodetabek, Komeng Dukung Penyegelelan 4 Tempat Wisata di Puncak

Arso P Nugroho

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Bustami atau Komeng, menyambut baik langkah pemerintah yang menyegel empat tempat wisata di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyegelelan itu dilakukan karena melanggar izin alih fungsi lahan dan diduga memicu banjir.

Menurut Komeng, langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang cepat tanggap merespons bencana banjir di Puncak sangat bagus. Kata Komeng, kawasan Puncak merupakan awal dari penyelesaian persoalan banjir di Jakarta dan Bekasi yang belakangan ini terjadi.

“Bagus, Pak Gubernur, kalau memang itu penyebab terjadinya banjir. Karena yang seharusnya menjadi resapan air, ini malah jadi bangunan. Puncak itu hulunya, hilirnya ada ke Jabodetabek,” kata Komeng, Jumat (7/3/2025).

Komeng lantas meminta pemerintah tidak pilih kasih dalam melakukan penindakan atau menegakkan aturan. Ia menegaskan bahwa semua bangunan yang melanggar aturan



Wisata rekreasi Hibisc Fantasy Puncak Bogor, Jawa Barat yang disegel pemerintah. (Foto Kompas)

harus ditertibkan, tanpa pandang bulu, baik milik BUMD maupun swasta. “Kalau memang itu mengganggu, harus ditertibkan,” ujarnya.

Selain alih fungsi lahan wisata, Komeng juga menyoroti bangunan yang berada di bantaran sungai. Menurutnya, bangunan di bantaran sungai perlu ditertibkan untuk memastikan aliran sungai tetap lancar.

“Bangunan yang ada di bantaran sungai, mulai dari hulu sampai hilir, harus ditertibkan agar aliran sungai lancar,” tambahnya.

Diketahui, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto menyegel empat tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, pada Kamis (6/3/2025).

Penyegelelan dilakukan karena tempat wisata tersebut melanggar aturan alih fungsi lahan.

Lokasi yang disegel yakni Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2, Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya akan mengembalikan alam Jawa Barat seperti semula sesuai dengan penataan ruang, demi menyelamatkan warga Jawa Barat dan Jakarta.

“Untuk itu, kami juga akan berkoordinasi dengan Gubernur Jakarta untuk membicarakan hal ini karena Jawa Barat adalah palang pintunya Jakarta. Yang paling utama, warga di Jakarta tidak boleh lagi membangun vila dan sejenisnya di Puncak,” tegas Dedi. (\*)



# Banjir Masih Mengancam Warga Jakarta



Anggota DPD RI Fahira Idris menyerahkan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok bagi warga yang menjadi korban banjir di Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. (Foto Tim Fahira Idris)

## Fandi Tri Prayogo

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Daerah Khusus Jakarta, Fahira Idris, menyerahkan bantuan berupa kebutuhan pokok kepada warga yang menjadi korban banjir di Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2025). Bantuan diserahkan di posko pengungsian di kawasan Rawajati.

“Saya datang tidak hanya untuk memberikan bantuan, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan warga terdampak terpenuhi,” kata Fahira Idris saat berdialog dengan Ketua RT, RW, dan perwakilan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) se-

tempat untuk mendengarkan langsung kebutuhan serta keluhan warga yang terdampak banjir.

Fahira menyebutkan bahwa banjir masih menjadi ancaman besar bagi warga Jakarta. Ia menyoroti dua langkah penting yang harus segera dilakukan oleh Pemprov Jakarta dalam menghadapi banjir. Pertama, mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk melakukan tindakan darurat bagi warga terdampak. Kedua, mempercepat pelaksanaan program pengendalian banjir yang sudah direncanakan.

Tindakan darurat yang perlu segera dilakukan mencakup evakuasi warga dari area terdampak, terutama kelompok rentan seperti

anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Selain itu, perlu disediakan posko pengungsian yang layak dengan fasilitas memadai. Setiap posko harus memiliki akses air bersih, toilet yang cukup, serta fasilitas kesehatan. Pemisahan ruang laki-laki dan perempuan juga diperlukan guna menjaga kenyamanan dan keamanan para pengungsi.

“Pendistribusian bantuan logistik dan medis perlu dipastikan berjalan lancar. Stok makanan siap saji, air minum, susu bayi, popok, dan selimut harus mencukupi bagi semua warga terdampak. Obat-obatan untuk penyakit pascabanjir, seperti diare, infeksi kulit, dan demam, harus segera didistribusikan,” ucapnya.

Sembari fokus pada penanganan masyarakat terdampak banjir, Fahira menekankan pentingnya percepatan program pengendalian banjir, seperti pengerukan saluran air dan perbaikan drainase yang tersumbat akibat sampah atau sedimentasi. Ia juga menyarankan agar Jakarta memiliki sistem pompa air otomatis di daerah rawan banjir serta memperbanyak pembangunan drainase vertikal atau sumur resapan di permukiman, kawasan komersial, dan jalan.

“Revitalisasi waduk dan normalisasi sungai harus dipercepat karena ini adalah langkah penting dalam pengendalian banjir,” tegasnya. (\*)

# Seribu Paket Sembako Senator Buat Korban Banjir Pekanbaru

Lela Sa'dia

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Provinsi Riau menyerahkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir di Pekanbaru, Riau. Paket sembako tersebut diserahkan secara simbolis kepada Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kota Pekanbaru di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, Sabtu (8/3/2025).

Penyerahan bantuan ini dihadiri langsung oleh keempat anggota DPD RI dari daerah pemilihan Riau, yaitu Sewitri, KH Mursyid, Arif Eka Putra, dan Abdul Hamid. Acara ini juga disaksikan oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho.

“Bantuan paket sembako ini merupakan wujud kepedulian dan rasa duka kami terhadap musibah yang melanda masyarakat Pekanbaru. Dalam penyaluran bantuan ini, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial,” ujar Sewitri.

Sewitri, satu-satunya senator perempuan dari Provinsi Riau, berharap Kota Pekanbaru segera terbebas dari banjir agar warga dapat kembali menjalani ak-



Anggota DPD RI menyerahkan seribu paket sembako secara simbolis kepada Kepala Satgas Penanggulangan Bencana Kota Pekanbaru. (Foto Istimewa)

tivitas mereka dengan normal. Ia juga menekankan pentingnya kondisi yang kondusif agar masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan tenang.

Sementara itu, Kasatgas Penanggulangan Bencana Kota Pekanbaru, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Ia menegaskan bahwa bantuan sembako ini sangat berarti bagi masyarakat terdampak.

“Terima kasih kepada teman-teman dari DPD RI, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, dan warga Pekanbaru yang turut memberikan bantuan bagi korban banjir. Kepedulian ini sangat berarti bagi mereka,” ujar

Kombes Jeki.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, turut menyampaikan apresiasinya. Ia menjelaskan bahwa penanganan korban banjir di tiga kecamatan di Kota Pekanbaru saat ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir, anggaran yang telah dikeluarkan hampir mencapai Rp16 miliar. “Pemerintah kota berupaya memastikan kebutuhan korban banjir terpenuhi,” jelasnya.

Selain menyerahkan bantuan sembako, para senator dari Negeri Lancang Kuning itu juga ikut sahur bersama para pengungsi di tenda pengungsian di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, pada Minggu (9/3/2025) dini hari. (\*)



# 60 Ha Lahan Pertanian Direndam Banjir di Sidoarjo



Anggota DPD RI Lia Istifhama saat meninjau lokasi banjir di Desa Pesawahan, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. (Foto Tim Lia Istifhama)

**Rini Sumarni**

Penulis

**A**nggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lia Istifhama, meninjau lokasi banjir di Desa Pesawahan, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (28/2/2025). Dalam kunjungan ini, Senator Lia didampingi Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Andhika N. Sudigda, serta Kepala Desa Pesawahan, Pranoto.

Desa Pesawahan merupakan salah satu lumbung pangan di Sidoarjo. Namun, seringkali bencana banjir menyebabkan produksi padi di wilayah ini menurun drastis.

“Biasanya, dalam setahun petani bisa panen tiga kali.

Tetapi, karena banjir yang terus terjadi, kini hanya bisa satu kali panen, bahkan kadang gagal total. Ada sekitar 60 hektare lahan pertanian yang terendam banjir di wilayah ini,” jelas Pranoto.

Sekretaris BPBD Jawa Timur menjelaskan bahwa penyebab utama banjir adalah penggabungan tiga sungai menjadi satu aliran, yang menyebabkan air meluap saat hujan deras. Meskipun Desa Pesawahan telah memiliki rumah pompa sebagai upaya penanggulangan, biaya operasional yang tinggi membuatnya sulit dijalankan secara maksimal. Salah satu solusi jangka panjang yang diusulkan adalah mengembalikan fungsi sungai seperti semula agar aliran air dapat terdistribusi dengan baik dan tidak menumpuk di satu jalur.

Senator Lia menegaskan bahwa permasalahan banjir di Desa Pesawahan akan dibawanya ke pembahasan di DPD RI bersama kementerian terkait. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya masalah bagi petani, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan nasional.

“Sebagai daerah lumbung pangan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Lia meminta pemerintah daerah segera mencari solusi terbaik untuk membantu petani yang terdampak.

“Pemerintah harus segera mengambil langkah nyata agar petani mendapatkan bantuan dan solusi jangka panjang. Ini bukan hanya soal ekonomi petani, tetapi juga ketahanan pangan nasional yang harus dijaga,” ujarnya.

Lia juga menekankan pentingnya solusi berkelanjutan. Jika ingin mengembangkan produktivitas pertanian, maka penyudetan sungai harus dilakukan agar air dapat mengalir dengan baik dan tidak menggenangi lahan pertanian.

“Saya salut dengan semangat warga yang secara swadaya mengumpulkan dana untuk operasional rumah pompa. Namun, ini tidak bisa terus-menerus mengandalkan dana desa dan masyarakat. Kolaborasi antara pemangku kebijakan, dari tingkat desa hingga pemerintah pusat, sangat penting,” tandasnya. (\*)

# Kondisi Cuaca Tak Menentu Masyarakat Dimbau Siap Siaga

Betria Eriani

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Rahmijati Jahja, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir akibat curah hujan yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi cuaca yang berubah-ubah ini berpotensi memicu bencana, terutama di wilayah yang rawan genangan dan banjir.

Rahmijati menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam.

“Saat ini, cuaca sulit diprediksi. Curah hujan sering kali turun tiba-tiba dengan intensitas tinggi, yang dapat meningkatkan risiko banjir, terutama di daerah perkotaan dengan sistem drainase yang kurang optimal serta wilayah rendah yang sering terdampak genangan,” ujarnya, Selasa (4/3/2025).

Senator asal Gorontalo itu juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di saluran air serta menjaga kebersihan ling-



Anggota DPD RI Rahmijati Jahja. (Foto Istimewa)

“**Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sangat penting. Jangan sampai saluran air tersumbat karena kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan.**”

**Anggota DPD RI,  
Rahmijati Jahja**

kungan guna mencegah penyumbatan drainase yang dapat memperparah banjir.

“Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sangat penting. Jangan sampai saluran air tersumbat karena kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan,” tegasnya.

Selain itu, Rahmijati

mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk lebih aktif dalam mitigasi bencana, termasuk melakukan normalisasi sungai, memperbaiki sistem drainase, serta memastikan kesiapan tempat evakuasi dan bantuan darurat bagi warga terdampak banjir.

Senator empat periode ini berharap masyarakat terus memantau informasi cuaca terkini dan selalu waspada terhadap kemungkinan banjir bandang serta tanah longsor di daerah perbukitan.

“Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu ini, mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dampak bencana yang mungkin terjadi,” pungkasnya. (\*)



# Danantara Perlu Perluas Pelayanan Hingga Daerah

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai sinyal kebangkitan perekonomian Indonesia. Danantara tidak hanya merupakan lembaga investasi, namun juga sebagai soko guru perekonomian nasional.

**Arso P Nugroho**

Penulis



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Kami mengapresiasi keinginan politik Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda perekonomian nasional dengan pendekatan asas kekeluargaan. Dalam perspektif sosiologis, lembaga investasi ini seperti koperasi raksasa yang beranggotakan BUMN andalan Indonesia,” ujar Sultan kepada awak media, usai menghadiri acara peluncuran Danantara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu percaya bahwa Danantara akan mampu menyaingi International Monetary Fund (IMF). Dengan demikian, ke depan Indonesia tidak lagi tergantung pada pembiayaan asing. Karena itu, Sultan meminta masyarakat untuk tidak perlu ragu terhadap masa depan Danantara. Sebagai bangsa yang besar, harus

“Harapan besar kami, Danantara bisa menjadi solusi bagi kemudahan masyarakat dalam menjangkau dan mengakses lembaga keuangan serta mendistribusikan modal usaha bagi masyarakat. Sehingga terjadi peningkatan aktivitas hilirisasi di sektor riil dan investasi secara merata di daerah.”

**Ketua DPD RI,  
Sultan B Najamudin**

percaya diri dan mendukung setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kinerja perekonomian nasional.

“Harapan besar kami, Danantara bisa menjadi solusi

bagi kemudahan masyarakat dalam menjangkau dan mengakses lembaga keuangan serta mendistribusikan modal usaha bagi masyarakat. Sehingga terjadi peningkatan aktivitas hilirisasi di sektor riil dan investasi secara merata di daerah,” tegasnya.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu meminta pihak manajemen Danantara untuk melakukan sosialisasi dan perluasan pelayanan hingga ke daerah, termasuk menjadi lembaga pembiayaan bagi program pemerintah pusat dan daerah.

“Kami optimistis dan berharap masyarakat Indonesia akan menyambut baik serta mendukung lembaga investasi milik negara bentukan Presiden ini. Kepercayaan publik adalah modal utama Danantara untuk bisa tumbuh dan menjadi tulang punggung sektor keuangan nasional,” kata Sultan. (\*)

# Pemerintah Jangan Ganggu Biaya Pendidikan Madrasah



Wakil Ketua Komite III DPD RI Dailami Firdaus. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Adi Nugroho**

Penulis

**S**eiring dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, muncul keresahan dan kegaduhan di masyarakat dengan beredarnya surat edaran pemotongan dana bantuan operasional (BOS) Madrasah yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dailami Firdaus dengan tegas mengatakan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu alokasi anggaran untuk layanan pendidikan dan kesehatan. “Saya tegas menolak dan meminta pemerintah jangan mengganggu alokasi

bantuan biaya pendidikan di semua jenjang sekolah hingga perguruan tinggi,” tegasnya, Jumat (21/2/2025).

Ia juga mempertanyakan surat edaran tertanggal 14 Februari 2025 dari Dirjen Pendidikan Islam Kemenag kepada jajaran di bawahnya terkait tindak lanjut efisiensi belanja dengan pemotongan dana BOS Madrasah Ibtidaiyah (MI) menjadi Rp500 ribu/siswa/tahun, MTs Rp600 ribu, dan Madrasah Aliyah (MA) Rp700 ribu.

“Yang diterapkan ini berdasarkan kajian apa? Ada juga pesantren penerima bantuan operasional dan bantuan operasional PTN turun tinggal 50 persen, dasarnya apa? Jangan karena program Makan Bergizi Gratis kemudian jadi membabi buta. Kalau tidak bisa direali-

alisasikan tahun ini, tentu bisa tahun depan untuk dibahas dulu secara seksama bersama para wakil rakyat,” katanya.

Senator dari Dapil Daerah Khusus Jakarta ini menekankan, efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan secara serampangan. Apalagi karena hanya harus memenuhi target penghematan senilai Rp3 triliun lebih sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Dia menyarankan sebaiknya kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan harus tegas memastikan tidak ada efisiensi berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat. “Apa efisiensi bantuan biaya pendidikan ini sudah sepengetahuan dan seizin Pak Prabowo? Sebab, setahu saya Pak Presiden sangat peduli terhadap pendidikan anak-anak sebagai masa depan bangsa,” ujarnya.

Dailami meminta agar efisiensi anggaran dilakukan untuk proyek-proyek yang tidak *urgent*. Meskipun, justru biasanya para pejabat senang kalau ada banyak proyek. Jangan orientasinya proyek yang diselamatkan dari efisiensi, tapi malah mengorbankan esensi, termasuk pentingnya pendidikan. (\*)

# Senator Penrad Soroti Masalah Serius Progam MBG

Theresia Oktavina

Penulis

**P**rogram Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kembali menuai kritik. Kali ini muncul dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pdt. Penrad Siagian. Dia menyoroti sejumlah masalah serius dalam pelaksanaan program ini, mulai dari kualitas makanan yang tidak layak konsumsi, ketidaktepatan sasaran, hingga potensi korupsi akibat skema yang tidak tertib.

“Skema massal seperti ini mengakibatkan sulit dilakukan pengawasan. Ada laporan makanan beracun, ada belatung, dan tidak layak konsumsi. Ini sangat memprihatinkan,” ujar senator dari daerah pemilihan Sumatera Utara ini dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

Kritik yang disampaikan itu bukan tanpa alasan. Kritikan itu disampaikan merespons beberapa kasus keracunan massal yang telah terjadi di sejumlah daerah. Pada Kamis, 6 Januari 2025, sebanyak 40 siswa di Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG yang terdiri dari nasi putih, ayam goreng tepung, tumis wortel dan tahu, buah naga, serta susu kemasan. Para siswa



Anggota DPD RI Penrad Siagian. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

mengalami mual dan muntah usai mengonsumsi makanan tersebut.

Kasus serupa juga terjadi di SDN 003 Nunukan Selatan, Kalimantan Utara, pada Senin, 13 Januari 2025. Sebanyak 29 murid dilaporkan sakit dan diare setelah mengonsumsi makanan dari program ini. Tak hanya itu, delapan murid SDN 7 Tebing Tinggi juga mengalami sakit perut usai menyantap menu MBG kloter ketiga yang diluncurkan pada Senin, 17 Februari 2025.

Masalah kualitas makanan juga terjadi di Empat Lawang, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa, 18 Februari 2025. Di Empat Lawang, ulat belatung ditemukan dalam porsi makanan yang dibagikan kepada siswa, sementara di Labuan

Bajo, belatung dan buah busuk ditemukan dalam makanan untuk siswa SMP Negeri 1 Komodo. “Ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dalam program ini. Bagaimana mungkin makanan yang seharusnya bergizi justru membahayakan kesehatan anak-anak?” tegas Penrad.

Selain masalah kualitas, Penrad juga menyoroti ketidaktepatan sasaran program. Menurutnya, program ini diberikan kepada semua anak sekolah tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga. Tidak semua anak-anak itu masuk dalam kategori penerima subsidi makan bergizi gratis. Seharusnya ada skema dan mekanisme lain yang betul-betul diperhitungkan sehingga anak-anak dari keluarga ekonomi bawah yang mendapatkannya. (\*)

# Harus Ditindak Tegas Pelaku Curangi Takaran Minyakita

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

**P**ihak kepolisian menemukan dugaan pengurangan kapasitas Minyakita dari 1 liter menjadi hanya 700-900 mililiter. Selain itu, di pasaran juga ditemukan harga jual eceran Minyakita yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris, mengancam kecurangan ini. “Ini masalah serius dan harus segera dituntaskan oleh pemerintah. Ketidaksiuaian volume minyak goreng Minyakita adalah pelanggaran yang harus segera ditindak tegas,” kata Fahira, Senin (10/3/2025).

Menurut Fahira, kecurangan ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap program minyak goreng bersubsidi pemerintah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, senator dari Daerah Khusus Jakarta itu mengusulkan tiga rekomendasi yang patut segera



Ilustasi Minyakita (Foto Isitimewa)

dilakukan pemerintah, yaitu meningkatkan pengawasan produksi dan distribusi, menegakkan hukum secara tegas, serta memastikan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengawasan.

Dalam hal pengawasan produksi dan distribusi, pemerintah perlu memperkuat pemantauan di seluruh rantai produksi dan distribusi Minyakita guna memastikan volume minyak goreng dalam kemasan sesuai ketentuan.

Satuan Tugas (Satgas) Pangan dan kepolisian harus mengintensifkan inspeksi mendadak serta melakukan audit rutin terhadap produsen Minyakita. Selain itu, pemerintah harus memberikan sanksi tegas

bagi produsen yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pencabutan izin usaha, denda berat, dan proses hukum pidana. Tanpa tindakan tegas, pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab akan terus mencari celah untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan merugikan konsumen.

Terkait transparansi dan keterlibatan publik, masyarakat harus diberi akses mudah untuk melaporkan indikasi kecurangan dalam penjualan Minyakita. “Pemerintah dapat menyediakan *platform* pengaduan berbasis aplikasi atau *hotline* pengawasan harga dan kualitas minyak goreng,” tegas Fahira. (\*)

# Dengan Koperasi Merah Putih Desa Bisa Menjadi Produktif

Helena AF Ojan

Penulis

**K**etua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menyambut baik rencana pemerintah membentuk Koperasi Merah Putih di setiap desa. Menurutnya, DPD RI telah lama memberikan perhatian dan masukan agar pemerintah memperbanyak koperasi produksi di desa sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi pedesaan.

“Desa dan koperasi merupakan dua hal yang identik dengan nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dengan adanya koperasi di setiap desa, diharapkan desa dan daerah semakin produktif dan mandiri,” ujar Sultan dalam keterangan resminya, Senin (10/3/2025).

Sultan mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi produksi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki potensi besar sebagai lokomotif perekonomian desa dan daerah.

Agar koperasi ini berjalan optimal, Sultan menekankan pentingnya perencanaan yang matang dengan pendekatan manajemen yang profesional. “Koperasi tidak boleh hanya



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat menghadiri Munas Dekopin 2024. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Desa dan koperasi merupakan dua hal yang identik dengan nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dengan adanya koperasi di setiap desa, diharapkan desa dan daerah semakin produktif dan mandiri.”

Ketua DPD RI,  
Sultan B Najamudin

sekadar menjadi lembaga keuangan mikro, tetapi harus mampu bertransformasi menjadi industri dan pusat hilirisasi komoditas unggulan di desa. Yang paling penting adalah memastikan koperasi ini benar-benar mampu

menunjang produktivitas sektor riil serta meningkatkan nilai tambah komoditas yang dihasilkan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sultan menyoroti bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih akan mendapat sambutan antusias, terutama dari para ibu rumah tangga yang menjadi pelaku industri rumahan di desa. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada skema pembiayaan yang diterapkan.

“Skema pembiayaan koperasi ini harus berbasis komoditas unggulan yang dihasilkan secara massal di desa tertentu. Dengan demikian, manajemen koperasi tidak perlu membebankan bunga utang atau jaminan kredit kepada masyarakat,” tutupnya. (\*)

# DPD RI Terima Kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam

Lelas Sa'diah

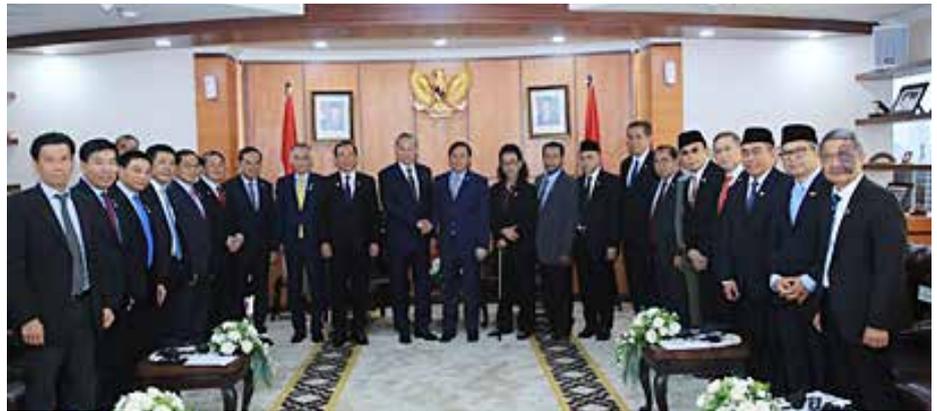
Penulis

**K**etua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menerima kunjungan resmi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). To Lam didampingi Duta Besar Republik Sosialis Vietnam untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Ta Van Thong.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan didampingi oleh Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai. Turut hadir pimpinan Komite I, Andi Sofyan Hasdam dan Muhdi, serta pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, Darmansyah Husein, dan Mirah Midadan Fahmid.

Sultan menegaskan bahwa Vietnam memiliki posisi strategis di mata Indonesia. Ia berharap kunjungan ini memberikan kesan mendalam bagi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam serta membuka peluang kerja sama yang lebih erat di masa depan.

"Indonesia dan Vietnam memiliki banyak kesamaan sejarah. Kita sama-sama bangsa pejuang yang berhasil mengusir penjajah, menolak imperialisme, dan menjaga



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin didampingi para Wakil Ketua DPD RI dan pimpinan alat kelengkapan terkait saat menerima kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

kedaulatan negara dari intervensi asing. Hal ini menjadi dasar kuat untuk mempererat kerja sama, baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN," ujar Sultan.

Terkait persepsi di sebagian masyarakat Vietnam yang menganggap Indonesia kurang aman untuk dikunjungi, Sultan menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Ia memastikan bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan terbuka bagi wisatawan serta mitra internasional. "Indonesia selalu menjadi negara yang siap menjalin kerja sama dengan Vietnam, bahkan sejak masa sulit ketika banyak negara menghentikan bantuannya kepada Vietnam saat perang," tambahnya.

Lebih lanjut, Sultan menyoroti potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam berbagai bidang. Ia menyampaikannya bahwa kerja sama

yang selama ini bersifat *Government to Government (G2G)* perlu diperluas menjadi *People to People*, sehingga semakin mempererat hubungan kedua negara di tingkat masyarakat. Dalam rangka memperkuat kerja sama ini, DPD RI berencana melakukan kunjungan balasan resmi ke Vietnam dalam waktu dekat.

Menanggapi hal tersebut, To Lam menyatakan kesiapan Vietnam untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, terutama di sektor parlemen. Ia menekankan bahwa di tengah situasi global yang penuh tantangan, memperkuat solidaritas dan kolaborasi antarnegara ASEAN menjadi semakin penting. "Kerja sama antara parlemen Indonesia dan Vietnam dapat menjadi jembatan bagi hubungan yang lebih luas, termasuk dalam sektor ekonomi, perdagangan, dan keamanan," ujar To Lam. (\*)



# GKR Hemas Dorong Gerakan Perempuan Dalam Politik



Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam Forum Silaturahmi Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**Nanda Russia Rola**

Penulis

**I**su pemberdayaan politik perempuan terus menjadi perhatian penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Saat ini, pemberdayaan perempuan dalam politik dilakukan melalui dua strategi utama, yakni advokasi dan peningkatan kapasitas (*capacity building*). Berkaitan dengan hal ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, terus mendorong gerakan perempuan untuk aktif dalam dunia politik guna memperkuat peran mereka dalam pengambilan kebijakan yang lebih inklusif.

Dalam Forum Silaturahmi Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Rabu (12/3/2025), GKR Hemas menegaskan pentingnya advokasi keterwakilan perempuan dalam

lembaga politik dan partai politik. “Saat ini, fokus advokasi gerakan perempuan adalah mendorong 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga politik dan partai politik. Perlu ada penajaman isu-isu terkait dengan perempuan hingga penyelesaiannya. Kita masih punya kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja wanita,” ujarnya.

Selain isu ketenagakerjaan, GKR Hemas juga menyoroti beberapa persoalan strategis lainnya yang perlu menjadi perhatian gerakan perempuan politik. Di antaranya adalah isu perubahan iklim, kekerasan terhadap anak, pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo. Menurutnya, perempuan harus aktif dalam memastikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok perempuan dan anak-anak.

Luluk Nurhamidah, perwakilan dari KPPRI yang juga memandu forum ini, menyampaikan bahwa GKR Hemas sejak lama selalu mendorong adanya ruang kolaborasi antara KPPRI, KPPI, serta berbagai organisasi perempuan lainnya. Ia menekankan bahwa keberadaan wadah diskusi semacam ini sangat penting untuk memperkuat jaringan perempuan di dunia politik. “Saya tahu betul, beliau ingin bagaimana posisi, peran, dan kedudukan perempuan semakin hari semakin kuat dan membawa perubahan yang bermakna,” tegasnya.

Sementara itu, Irma Suryani Chaniago yang mewakili KPPI menambahkan bahwa semua peserta forum ini adalah perempuan hebat yang memiliki kapasitas untuk memberikan kontribusi nyata. Ia menekankan bahwa forum ini bertujuan untuk merumuskan strategi konkret dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik serta menentukan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan ke depan.

Forum ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai partai politik, seperti Nasdem, PKB, Gerindra, PAN, PKS, PDIP, dan Demokrat, serta senator perempuan dari berbagai daerah. Kehadiran lintas partai dalam forum ini menunjukkan bahwa isu pemberdayaan perempuan bukan hanya tanggung jawab satu kelompok, tetapi merupakan agenda bersama yang harus terus diperjuangkan demi terwujudnya kesetaraan gender dalam dunia politik dan kebijakan publik. (\*)

# Penurunan Tarif Pesawat Sultan: Semua Maskapai Harus Patuh

M Fathoni

Penulis

**M**enjelang mudik Lebaran 2025, pemerintah melalui PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) membuat kebijakan penurunan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U). Kebijakan tersebut signifikan mengurangi biaya operasional penerbangan dan secara langsung dapat menurunkan harga tiket.

“Kami mengapresiasi langkah berani pemerintah dalam melakukan terobosan kebijakan penurunan biaya perjalanan moda transportasi udara ini. Tujuannya adalah agar semua kalangan masyarakat dapat memanfaatkan moda transportasi udara atau pesawat dalam aktivitas perjalanan dan mobilitas sosial sehari-hari,” kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin, Selasa (4/3/2025).

Keberadaan moda transportasi udara sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan. Akses transportasi udara menjadi *urgent* untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara cepat ke seluruh daerah dalam jumlah



Ilustrasi sebuah pesawat hendak mendarat. (Foto Blog EF)

“Alhamdulillah, kita memiliki modal infrastruktur bandar udara yang memadai di banyak daerah dan ini modal utama transportasi udara yang perlu dimanfaatkan secara optimal.”

**Ketua DPD RI,  
Sultan B Najamudin**

besar, khususnya di musim mudik Lebaran. “Alhamdulillah, kita memiliki modal infrastruktur bandar udara yang memadai di banyak daerah dan ini modal utama transportasi udara yang perlu dimanfaatkan secara optimal,” kata Sultan.

Mantan Ketua HIPMI

Bengkulu itu berharap agar insentif kebijakan penurunan tarif tersebut berlaku permanen di semua bandar udara dan dipatuhi oleh semua maskapai penerbangan. Sehingga dapat menarik lebih banyak maskapai penerbangan untuk beroperasi di semua wilayah Indonesia. Diharapkan terjadi peningkatan permintaan penggunaan moda transportasi udara untuk keperluan mobilitas sosial, bisnis, dan wisata secara luas.

Diketahui bahwa InJourney Airports menurunkan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) sebesar 50 persen. Kebijakan ini berlaku di seluruh bandara yang dikelola *InJourney Airports*. (\*)

# Senator Mirah Dukung Penurunan Harga Tiket Pesawat

Betria Eriani

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mirah Midadan Fahmid mendukung program pemerintah terkait penurunan tarif tiket pesawat domestik menjelang Lebaran atau perayaan Idulfitri 1446 H. Sebab, selama ini terjadi lonjakan harga tiket yang kerap terjadi menjelang Lebaran dan memberatkan masyarakat, terutama bagi perantau yang ingin pulang ke kampung halamannya untuk berlebaran bersama keluarga.

“Lebaran adalah momen penting bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga. Selama ini kenaikan harga tiket yang terlalu tinggi justru menyulitkan mereka yang ingin merayakan hari besar ini di kampung halaman.

Alhamdulillah, menjelang Lebaran tahun ini pemerintah menurunkan tarif layanan penerbangan,” ujar Senator Mirah, Jumat (7/3/2025).

Menurutnya, setiap tahun menjelang Lebaran, harga tiket pesawat domestik mengalami kenaikan signifikan. Permintaan yang tinggi sering kali menjadi alasan utama, di samping terbatasnya jumlah penerbangan di beberapa rute tertentu. Dia mencontohkan di daerah pemilihannya, Nusa Tenggara Barat



Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

(NTB), lonjakan harga tiket kerap menjadi permasalahan karena jumlah penerbangan masih terbatas, khususnya di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dan Bandara Sultan Kaharuddin III Sumbawa.

Kondisi serupa juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi lain selain pesawat. Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus berpihak pada masyarakat agar perjalanan mudik tetap terjangkau dan nyaman. Dia pun mengusulkan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengendalikan harga tiket menjelang Lebaran, seperti menambah frekuensi penerbangan.

Senator Mirah berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk meng-

endalikan lonjakan harga tiket jelang Lebaran. Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Kita ingin memastikan bahwa setiap warga negara bisa merasakan kebahagiaan berkumpul dengan keluarga saat Lebaran tanpa harus terbebani biaya perjalanan yang tinggi. Pemerintah, maskapai, dan semua pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Sebagai anggota DPD RI, Mirah berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan di sektor transportasi agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan dan melaporkan jika ada indikasi kenaikan harga tiket yang tidak wajar. (\*)

# Mudik Gratis Solusi Nyata Ciptakan Perjalanan Nyaman



Ilustrasi mudik gratis. (Foto Kemenhub)

**Betria Eriani**

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Daerah Khusus Jakarta, Fahira Idris mengapresiasi program mudik gratis yang pada tahun ini kembali diselenggarakan oleh instansi pemerintah, pemerintah provinsi, BUMN dan sejumlah perusahaan swasta. Program Mudik Gratis merupakan salah satu solusi nyata untuk menciptakan perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan tertib selama arus Mudik dan Balik Lebaran 2025.

“Saya mengajak warga Jakarta, termasuk yang berencana mudik menggunakan sepeda motor, untuk memanfaatkan program Mudik Gratis ini agar dapat menikmati perjalanan dengan lebih aman dan nyaman tanpa

perlu menghadapi kelelahan akibat perjalanan panjang di jalan,” ujar Fahira Idris, Selasa (4/3/2025).

Senator Jakarta ini mengungkapkan, keamanan menjadi prioritas utama dalam program Mudik Gratis ini. Seluruh armada yang digunakan telah melewati uji kelayakan yang ketat, serta para pengemudi memiliki lisensi yang valid. Hal ini merupakan langkah mitigasi risiko yang sangat penting guna memastikan para pemudik dapat tiba di kampung halaman dengan selamat.

Selain itu, kenyamanan juga menjadi perhatian utama, dengan fasilitas yang lebih baik dibandingkan mengendarai kendaraan pribadi secara mandiri terutama sepeda motor yang memang bukan untuk perjalanan jarak jauh. “Menggunakan sepeda motor untuk perjalanan jauh sangat berisiko,

baik bagi pengendara maupun penumpangnya. Dengan mengikuti program Mudik Gratis dengan menggunakan transportasi umum, perjalanan akan lebih aman, nyaman dan juga hemat,” kata Fahira.

Sebagai informasi, pemerintah, pemerintah provinsi, BUMN, serta sejumlah perusahaan swasta sudah mulai membuka pendaftaran program Mudik Gratis Lebaran 2025. Kementerian Perhubungan misalnya melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyediakan program mudik gratis bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor.

Program ini bertujuan mengurangi risiko kecelakaan dengan memindahkan pemudik motor ke moda transportasi bus atau kapal laut. Pemprov Jakarta juga kembali mengadakan program Mudik Gratis dengan menyediakan 520 bus dengan tujuan berbagai kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera.

Selain itu, sebanyak 78 perusahaan BUMN juga ikut serta menyelenggarakan mudik gratis dengan target 100.000 pemudik yang terbagi ke dalam tiga moda transportasi yaitu 1.360 Unit Bus (kapasitas 67.000 pemudik), 90 Rangkaian Kereta Api (kapasitas 28.000 pemudik), 26 Unit Kapal Laut (kapasitas 5.000 pemudik) dengan tujuan lebih dari 200 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sejumlah perusahaan swasta juga akan ikut menyukseskan program Mudik Gratis ini. (\*)

# Mudik Gratis Jangan Diefisienkan

Fandi Tri Prayogo

Penulis

**M**eski pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah, Abdul Kholik, meminta pemerintah tidak mengesfisiensikan penyelenggaraan program Mudik Gratis. Alasannya, program Mudik Gratis merupakan program yang bagus dan bisa menekan penggunaan kendaraan pribadi.

“Ini sangat bagus untuk masyarakat agar tidak semua menggunakan kendaraan pribadi. Kalau semuanya menggunakan kendaraan pribadi, tentu nanti akan terjadi kemacetan yang menyulitkan penanganannya,” kata Abdul Kholik, baru-baru ini.

Program Mudik Gratis, kata Abdul Kholik, diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga swasta. Ia meminta agar program Mudik Gratis dari pemerintah harus ditingkatkan. “Pemerintah sedang membuat kebijakan efisiensi, yang lain boleh (diefisiensi). Akan tetapi, Mudik Gratis kalau bisa jangan,” jelasnya.

Untuk mendukung kelancaran mudik, ia juga meminta pemerintah tidak melakukan efisiensi di sektor



Sepeda motor peserta mudik gratis sedang diturunkan di Stasiun Yogyakarta. (Foto Detik)

“**Ini sangat bagus untuk masyarakat agar tidak semua menggunakan kendaraan pribadi. Kalau semuanya menggunakan kendaraan pribadi, tentu nanti akan terjadi kemacetan yang menyulitkan penanganannya.**”

Anggota DPD RI,  
Abdul Kholik

infrastruktur yang berkaitan dengan mudik. Jalan-jalan yang seharusnya mendapat perawatan menjelang Lebaran harus tetap diperbaiki agar perjalanan mudik lancar dan menjamin keselama-

tan para pemudik. Selain itu, ia mendorong pemerintah meningkatkan kualitas standar infrastruktur, termasuk untuk jalur transportasi darat, laut, dan udara.

Senada dengan Abdul Kholik, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno juga meminta pemerintah tetap menganggarkan program Mudik Gratis. Menurutnya, program mudik Lebaran harus mendapatkan anggaran yang memadai, bahkan jika memungkinkan harus diperbanyak.

Dia pun berharap dengan adanya program Mudik Gratis ini, mudik dengan menggunakan sepeda motor bisa diminimalkan. “Karena mudik dengan sepeda motor itu tidak efektif juga. Karena itu, justru harus diperbanyak menggunakan bus,” katanya. (\*)

# JANGAN TUNDA Pengangkatan CPPPK

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

**W**akil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi, mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN), baik untuk pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurutnya, penundaan tersebut, khususnya bagi PPPK, semakin memperpanjang penderitaan mereka yang selama ini telah lama bekerja sebagai tenaga Non-ASN dengan honor yang minim.

“Semakin kecewa dan menderita hati para CASN dari PPPK, terutama bagi mereka yang usianya sudah mendekati batas usia pensiun (BUP). Bahkan, di antara mereka ada yang hanya tinggal dua tahun lagi sebelum mencapai BUP. Jika pengangkatan mereka ditunda hingga Maret 2026, maka masa kerja mereka hanya tersisa satu tahun,” ungkap Muhdi, Senin (10/3/2025).

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan bahwa pengangkatan CASN PNS dan PPPK diundur dari Maret 2025 menjadi Oktober 2025 untuk PNS, sementara PPPK baru akan diangkat pada Maret 2026. Muhdi menilai



Wakil Ketua Komite I DPD RI Muhdi. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

penundaan ini, khususnya bagi ASN PPPK, merupakan bentuk pengingkaran terhadap komitmen kebijakan pemerintah sendiri serta Undang-Undang ASN yang menetapkan tahun 2024 sebagai batas akhir keberadaan tenaga Non-ASN di instansi pemerintah.

Muhdi mengaku sulit memahami alasan yang disampaikan pemerintah terkait penundaan ini, kecuali alasan kesulitan anggaran. Ia mengungkapkan bahwa dalam rapat kerja Komite I DPD RI dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 24 Februari 2025, Kepala BKN melaporkan bahwa proses pengangkatan ASN akan berjalan sesuai rencana.

“Bahkan, dilaporkan untuk peserta seleksi tahap I dari 676.482 CASN PPPK, sebanyak 671.667 sudah mengisi daftar riwayat hidup (DRH).

Sementara itu, seleksi tahap II untuk formasi ASN PPPK yang tersisa, sebanyak 329.671 formasi, saat ini sudah masuk masa sanggah dan dijadwalkan pengumumannya pada Mei 2025, dengan pengisian DRH pada Juni 2025,” jelasnya.

Namun, hanya 10 hari setelah rapat tersebut, pemerintah justru mengumumkan penundaan pengangkatan CASN dengan berbagai alasan. Muhdi menilai kebijakan ini sulit dipercaya dan mendesak Presiden Prabowo untuk mencabut keputusan penundaan tersebut.

“Jika memang harus ditunda, maka cukup 1 atau 2 bulan saja. Atau, jika ingin disamakan dengan tahap II untuk CASN PPPK, paling lambat pengangkatan dilakukan pada Agustus 2025 sebagai hadiah bagi para pegawai dalam rangka HUT RI,” tegasnya. (\*)

# Senator Lia Dukung Guru ASN Bisa Ngajar di Swasta

Rini Sumarni

Penulis

**A**nggota DPD RI asal Provinsi Jawa Timur Lia Istifhama, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan redistribusi guru aparatur sipil negara (ASN) agar dapat mengajar di sekolah swasta yang kekurangan tenaga pendidik. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 1 Tahun 2025.

Menurut Lia, kebijakan ini merupakan solusi konkret dari pemerintah dalam membantu sekolah swasta yang selama ini kesulitan mendapatkan tenaga pengajar berkualitas. Selain itu, regulasi ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta.

“Regulasi ini merupakan bukti nyata komitmen negara dalam memberikan dukungan terhadap eksistensi sekolah-sekolah swasta. Kebijakan ini tidak hanya menjamin pemerataan kualitas pendidikan, tetapi juga memberi kesempatan bagi sekolah swasta untuk mendapatkan akses tenaga pengajar berkualitas tanpa terbebani biaya tambahan,” ujar Lia



Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Timur Lia Istifhama (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Istifhama, baru-baru ini.

Agar kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran, Lia menekankan pentingnya transparansi dalam proses redistribusi guru ASN ke sekolah swasta. Ia mendorong adanya sistem terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait di dunia pendidikan, termasuk sekolah swasta.

“Diperlukan koordinasi yang baik antara semua pihak agar redistribusi guru ASN ini sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan tidak menimbulkan ketimpangan. Pemerintah juga harus memberikan pelatihan serta pemahaman kepada semua pihak yang terlibat dalam proses ini agar tidak terjadi diskriminasi, sehingga setiap sekolah swasta bisa memperoleh tenaga pendidik yang

berkualitas secara adil,” tambah Lia.

Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan data yang akurat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan bahwa data kebutuhan guru yang digunakan dalam proses redistribusi harus bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dapodik mencakup informasi mengenai kebutuhan tenaga pengajar di sekolah negeri maupun swasta, sehingga redistribusi guru ASN dapat dilakukan berdasarkan data yang valid dan akurat.

Dengan adanya kebijakan ini, Lia berharap sekolah swasta dapat semakin berkembang dan kualitas pendidikan di Indonesia semakin merata. (\*)

# Tenaga Pendidik di Lampung Tak Termotivasi Naik Pangkat



Anggota DPD RI asal Provinsi Lampung Almira Nabila Fauzi. (Foto Istimewa)

**Hestiana Kiftia Sari**

Penulis

**A**nggota DPD RI asal Provinsi Lampung Almira Nabila Fauzi, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung sebagai daerah pemilihannya.

“Banyak aspirasi yang masuk kepada kami terkait keluhan dari tenaga pendidik. Sebagai anggota DPD RI, kami menampung aspirasi tersebut dan berupaya mencari solusi. Harapannya, kami bisa memperjuangkan kesejahteraan guru dan dosen,” ujar Almira Nabila Fauzi di Bandar Lampung, Selasa (4/3/2025).

Salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan

“**Jika guru golongan III dikenakan pajak sebesar 5 persen, maka guru golongan IV terkena pajak sebesar 15 persen. Selain itu, ada aturan lain yang menyatakan bahwa guru PNS golongan III/d yang naik pangkat ke golongan IV/a akan mengalami pengurangan masa kerja selama tiga tahun.**”

**Anggota DPD RI asal Provinsi Lampung Almira Nabila Fauzi**

oleh guru dan dosen adalah minimnya motivasi untuk

mengurus kenaikan pangkat dari golongan III/d ke golongan IV/a. Hal ini disebabkan oleh besaran pajak yang lebih tinggi, yang justru berdampak pada berkurangnya pendapatan dari tunjangan profesi pendidik (TPP).

“Jika guru golongan III dikenakan pajak sebesar 5 persen, maka guru golongan IV terkena pajak sebesar 15 persen. Selain itu, ada aturan lain yang menyatakan bahwa guru PNS golongan III/d yang naik pangkat ke golongan IV/a akan mengalami pengurangan masa kerja selama tiga tahun,” jelas Almira.

Menanggapi permasalahan ini, Almira mendesak pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen. Ia berharap para pemangku kepentingan di Lampung dapat bekerja sama dalam mencari solusi atas berbagai isu yang dihadapi tenaga pendidik di daerah tersebut.

“DPD RI siap untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah ini. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan Insyaallah bisa kita atasi,” tegas senator asal Lampung itu. (\*)



# Senator Graal Usulkan Moratorium Izin Tambang di Maluku Utara

Arso P Nugroho

Penulis

**A**nggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara, Graal Taliawo, mengusulkan kebijakan jeda dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) guna mengatasi krisis lahan pertanian dan perkebunan di Maluku Utara.

“Kira-kira apakah memungkinkan, di tengah krisis pangan dan alih fungsi lahan yang masif ini, untuk menerapkan kebijakan jeda dalam penerbitan izin pertambangan baru?” kata Graal Taliawo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/3/2025).

Ia menyoroti bahwa Maluku Utara mengalami krisis lahan pertanian dan perkebunan akibat maraknya alih fungsi lahan menjadi kawasan pertambangan. Salah satu contoh adalah Kabupaten Pulau Taliabu yang lahannya hampir seluruhnya digunakan untuk izin pertambangan. Sementara itu, sekitar 50 persen wilayah Kabupaten Halmahera Tengah telah masuk dalam area konsesi pertambangan, dengan luas lahan pertanian yang tersisa hanya sekitar 2.600 hektare.

Jika situasi ini terus berlanjut, Graal memperingatkan bahwa pemenuhan pangan lokal akan semakin bergantung pada pasokan dari luar daerah, yang pada akhirnya menghambat upaya swasembada pangan. Selain itu, eksploitasi tambang yang tidak terkendali juga berdampak pada pencemaran air, menyebabkan banyak produk perikanan di wilayah tersebut tidak lagi layak dikonsumsi.

“Kami di Maluku Utara memiliki tiga teluk—Teluk Obi, Teluk Buli, dan Teluk Weda—yang perairannya kini tercemar logam berat. Berdasarkan riset, ikan-ikan dari teluk-teluk tersebut sudah tidak layak dikonsumsi karena mengandung merkuri. Belum lagi dampak



Anggota Komite II DPD RI Graal Taliawo bersama Wamen ESDM Yuliot Tanjung. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

ekologis lainnya,” ujarnya.

Graal menekankan pentingnya memperkuat kebijakan mitigasi lingkungan melalui evaluasi ketat terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ia mendesak pemerintah pusat untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, termasuk mencabut IUP bagi perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan.

Selain dampak ekologis, ia juga menyoroti konflik lahan yang kerap terjadi antara perusahaan tambang dengan masyarakat adat serta masyarakat lokal. Di Maluku Utara, misalnya, area hidup masyarakat adat Suku Tobelo Dalam di Halmahera Timur beririsan dengan lahan pertambangan, yang berpotensi mengancam keberlangsungan kehidupan mereka.

“Pemerintah harus turun tangan untuk memastikan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan kelestarian lingkungan serta hak-hak masyarakat,” tegasnya. (\*)

Kunjungi Pos TNI AL Kuala Kapuas:

# Senator Siti Aseanti Serap Aspirasi Personel



Anggota DPD RI Siti Aseanti saat mengunjungi Pos TNI AL Kuala Kapuas. (Foto Tiim Siti Aseanti)

**Nanda Russia Rola**

Penulis

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Siti Aseanti, mengunjungi Pos TNI AL Kuala Kapuas di bawah Pangkalan TNI AL Banjarmasin. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kesiagaan personel TNI AL selama bulan Ramadan sekaligus mendengarkan aspirasi mereka.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas saya sebagai anggota DPD RI untuk menyerap aspi-

rasi masyarakat, termasuk personel TNI AL. Setelah ini, saya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan mereka, khususnya di Kalimantan Tengah,” ujar Sean, sapaan akrabnya, dalam keterangannya, Minggu (9/3/2025).

Selain meninjau kesiagaan operasional, Sean juga memastikan bahwa para personel TNI AL yang bertugas di Kabupaten Kapuas mendapatkan perhatian yang layak. Dalam kunjungan tersebut, ia menyerahkan bantuan sembako sebagai bentuk apresiasi

atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas negara.

Lebih lanjut, Sean menyampaikan rencananya untuk mengunjungi daerah-daerah lain di Kalimantan Tengah guna menyerap lebih banyak aspirasi masyarakat. Ia berharap komitmennya ini dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan aparat keamanan di daerah tersebut.

Komandan Pos TNI AL Kuala Kapuas, Letda Laut (P) Kurniawan, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengungkapkan rasa bangganya atas perhatian yang diberikan.

“Ini adalah pengalaman pertama bagi kami. Selama ini belum pernah ada anggota DPD RI yang mengunjungi Pos TNI AL Kuala Kapuas. Kehadiran Ibu Siti Aseanti memberikan semangat baru bagi kami,” ujarnya.

Kurniawan menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi langkah nyata dari komitmen Sean dalam mendukung dan memperjuangkan aspirasi personel TNI AL serta masyarakat Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah secara keseluruhan. (\*)

# Senator Haji Uma Sambut Tiga Korban TPPO di Soetta

Lelas Sa'diyah

Penulis

**T**iga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Aceh yang dipulangkan dari Laos telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, pada Sabtu (1/3/2025). Kepulangan mereka difasilitasi oleh Protokol Kesekjenan DPD RI, dan disambut langsung oleh anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma.

Ketiga korban tersebut adalah MA (24) dari Aceh Utara, serta YU (27) dan FR (26) dari Lhokseumawe. Mereka harus menempuh perjalanan panjang sebelum akhirnya bisa kembali ke tanah air.

“Alhamdulillah, ketiga warga Aceh yang menjadi korban TPPO di Laos telah tiba dengan selamat di Tanah Air melalui Bandara Soekarno-Hatta,” ujar Haji Uma.

Setelah berhasil melarikan diri dari tempat mereka dipekerjakan sebagai scammer, ketiganya ber-lindung di kantor kepolisian Laos. Di bawah arahan tim Haji Uma serta perlindungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), mereka diberangkatkan ke Chiang Rai, Thailand, pada



Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman atau Haji Uma sedang berbincang dengan ketiga korban TPPO asal Aceh. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Rabu (26/2). Dari sana, mereka melanjutkan perjalanan ke Bangkok dengan transportasi udara. Setelah sempat menginap semalam di Bangkok, mereka terbang ke tanah air pada Jumat (28/2), dengan jalur transit di Malaysia. Mereka tiba di Jakarta pada Sabtu sekitar pukul 09.30 WIB.

Di Bandara Soekarno-Hatta, ketiga korban menceritakan pengalaman pahit mereka kepada Haji Uma. Mereka mengaku tergiur oleh janji manis serta iming-iming gaji besar, sehingga nekat berangkat ke Laos. Mereka dikirim ke Laos melalui jalur Medan – Jakarta – Thailand, lalu menyeberang ke Laos melalui perbatasan di Provinsi Chiang Rai. Di sana, mereka dipekerjakan oleh perusa-

haan milik warga keturunan Tionghoa Malaysia sebagai scammer.

Menanggapi hal ini, Haji Uma mengingatkan agar masyarakat Aceh lebih selektif dalam memilih pekerjaan di luar negeri. Ia menekankan pentingnya menggunakan jalur resmi yang telah terverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

“Saya sudah membantu lebih dari 10 kasus advokasi dan fasilitasi pemulangan korban TPPO dari luar negeri, termasuk dari Kamboja, Myanmar, dan Laos. Saya berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat Aceh agar tidak ada lagi korban berikutnya,” pungkas Haji Uma. (\*)

# PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA TIMBULKAN KONFLIK PERTANAHAN

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

**K**omite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin (17/2/2025). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pengawasan pelaksanaan program reforma agraria dan konflik pertanahan. Dalam kunjungan kerja tersebut, Komite I melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua dan Forkopimda Provinsi Papua.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi, mengatakan bahwa reforma agraria bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, menata ulang ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber-sumber agraria, mengurangi konflik, serta menyelesaikan sengketa pertanahan dan keagrariaan.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan yang tidak mudah. Apalagi di era industrialisasi saat ini, pesatnya pembangunan di Indonesia berdampak pada semakin sulitnya penyediaan tanah untuk keberlangsungan hidup masyarakat. “Hal ini



Komite I DPD RI ketika melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

acapkali menimbulkan situasi yang berujung pada sengketa atau konflik pertanahan, misalnya saja konflik pertanahan pada kawasan hutan,” kata Muhdi.

Paul Finsen Mayor, senator dari Papua Barat, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan reforma agraria dan penataan tanah adat/tanah ulayat, perlu melibatkan tokoh adat untuk berdiskusi dan melakukan urun rembuk. Sementara itu, Pdt. Penrad Siagian, senator dari Sumatra Utara, menegaskan bahwa tuntutan masyarakat adat terhadap hak atas tanah adat/tanah ulayat merupakan hal yang wajar, karena mereka memang memiliki hak untuk memperjuangkannya. Oleh karena itu, masyarakat adat mesti dilibatkan dalam konteks penataan tanah adat/tanah ulayat.

Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Ramses Limbong,

mendukung pelaksanaan reforma agraria. Untuk mendukung program tersebut, Gubernur Papua telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 188.4/41/Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Papua.

Dia menjelaskan bahwa konflik agraria yang sering terjadi di Provinsi Papua berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah adat/tanah ulayat. Konflik tersebut tidak hanya terjadi pada kepemilikan tanah milik masyarakat, tetapi juga pada tanah yang berada di dalam kawasan hutan. “Fenomena ini juga masuk ke ranah hukum. Terkait hal ini, dibutuhkan persamaan persepsi antara semua pihak, termasuk tokoh adat. Persamaan persepsi itu penting untuk membangun Provinsi Papua,” jelasnya. (\*)



# Penting Akurasi Data Dalam Perencanaan Pembangunan

Arso P Nugroho

Penulis

**K**etua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi, menekankan pentingnya data statistik yang akurat sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. Karena itu, peran Badan Pusat Statistik (BPS) semakin krusial dalam memberikan informasi yang valid dan terpercaya guna mendukung kebijakan nasional serta memastikan pembangunan yang merata di seluruh daerah.

“Data statistik yang akurat adalah fondasi kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kami mendukung langkah BPS dalam memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar tidak terjadi duplikasi data dan memastikan validitas informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan,” ujar Ahmad Nawardi dalam rapat kerja bersama BPS, Selasa (18/2/2025).

Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Komite IV DPD RI menekankan bahwa BPS harus memaksimalkan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan sensus guna meningkatkan



Pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI bersama Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

partisipasi masyarakat serta memastikan efisiensi pengumpulan data. Data perlu diperkuat guna memastikan kebijakan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, Komite IV DPD RI juga menyoroti pentingnya data mengenai kelompok rentan, seperti masyarakat miskin dan penyandang disabilitas. BPS diminta meningkatkan kualitas data sosial ekonomi agar kebijakan perlindungan sosial lebih tepat sasaran.

Komite IV DPD RI juga mendorong BPS untuk meningkatkan kompetensi tenaga statistik di tingkat pusat dan daerah melalui pelatihan berkala. Selain itu, program edukasi statistik untuk meningkatkan literasi data

bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, juga menjadi perhatian utama.

Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa BPS terus berupaya meningkatkan kualitas data statistik, baik dalam cakupan maupun ketepatan waktu penyediaannya. Data yang dihasilkan oleh BPS mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. “Saat ini, data statistik bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi dasar dalam perumusan kebijakan. Karena itu, BPS terus berkomitmen untuk menyediakan data yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan,” kata Amalia. (\*)

# Penyusunan RTRW di Daerah Masih Menghadapi Tantangan

Helena AF Ojan

Penulis

**P**enyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan kebijakan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian regulasi antara pusat dan daerah, tumpang tindih aturan dengan kebijakan sektoral lainnya—utamanya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker)—serta minimnya sosialisasi kepada pemerintah daerah.

“Penaikan kewenangan perizinan berusaha ke pusat berpotensi mengurangi peran daerah dalam mengelola tata ruang dan menghadapi dampak alih fungsi lahan untuk investasi,” kata Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Naman Stefanus BAN Liow, dalam dialog dengan sejumlah pakar di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (21/2/2025).

Pakar Hukum Tata Ruang Wilayah, Hairan, mengatakan bahwa pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Ruang, terdapat banyak implikasi yang harus diintegrasikan dengan perizin-



Ketua BULDDPD RI Naman Stefanus BAN Liow memberikan cendera mata kepada narasumber. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

an berusaha. Sementara itu, kewenangan kabupaten sudah tidak ada lagi. Ia mencontohkan kasus di Kalimantan Timur, di mana wilayah perbatasan di Kabupaten Mahakam Hulu belum diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pakar Pengembangan Wilayah/Tata Ruang Wilayah, Citra Anggita, menyampaikan implikasi tata ruang setelah UU Cipta Kerja. Menurutnya, tantangan ke depan adalah perlindungan terhadap hak masyarakat adat dan pengarusutamaan kearifan lokal dalam setiap kebijakan. “Intinya, tata ruang ada untuk peningkatan ekosistem investasi,” ujarnya.

Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan

Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, Nurani Citra Adran, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah melakukan penyesuaian RTRW. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa kawasan strategis provinsi dan telah berupaya melakukan penyesuaian melalui pendekatan *bottom-up* dan *top-down*.

“Pendekatan ini perlu dilakukan mengingat RTRW adalah kebijakan jangka panjang. Jika RTRW terlalu detail, maka dinamika perkembangan wilayah akan terhambat. Sebab, dinamika pembangunan berkembang lebih cepat daripada dinamika kebijakan,” kata Nurani Citra Adran. (\*)

# UU Ciptaker Membatasi Gerak Daerah Susun RTRW

M Fathoni

Penulis

Pasca terbitnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, daerah mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian kebijakan. Regulasi pusat yang cenderung sentralistik semakin membatasi ruang gerak daerah dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

“BULD DPD RI melihat masih terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang antara kawasan lindung, Hak Guna Usaha (HGU), dan lahan masyarakat, yang berujung pada ketidakpastian hukum dan konflik agraria,” kata Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Stefanus B.A.N. Liow, dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (26/2/2025).

Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, yang turut hadir dalam rapat tersebut menilai bahwa UU Cipta Kerja justru membatasi daerah dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Sentralisasi kebijakan ini berpotensi membuat daerah menjadi kurang mandiri.



Pimpinan dan anggota BULD bersama mitra kerjanya usai menggelar rapat dengar pendapat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Tentu masalah ini akan selalu menjadi sorotan tajam DPD RI. Kami berharap agar pemerintah dapat terus berkolaborasi dengan DPD RI dalam menjembatani permasalahan ini demi percepatan pembangunan daerah,” ujar Hemas.

Wakil Ketua BULD, Marthin Billa, menegaskan pentingnya penyelesaian segera atas konflik tata ruang yang menghambat akselerasi pembangunan. Ia juga mendorong percepatan implementasi kebijakan satu peta. “Realisasi kebijakan satu peta akan mencegah tumpang tindih regulasi antar-kementerian. Kami juga mendorong evaluasi atas pelaksanaan *self-declaration* izin berusaha mikro dan kecil dalam sistem OSS, mengingat banyaknya penyalahgunaan izin tata ruang dalam sistem tersebut,” kata Marthin.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Edison Siagian, menjelaskan bahwa Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 telah mengamanat-

kan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam penyelesaian integrasi atau revisi RTRW. “Kemendagri telah memberikan arahan kepada gubernur serta bupati/wali kota untuk mempercepat penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta pengintegrasian ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) guna meningkatkan efisiensi,” ujar Edison.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilizam, menekankan bahwa dalam rangka penyempurnaan implementasi UU Cipta Kerja, diperlukan perbaikan aturan teknis serta pengaturan tambahan terkait mekanisme integrasi antarmatra ruang. “Upaya penyempurnaan ini tetap harus dilanjutkan guna menjamin sinkronisasi antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang serta keberlanjutan pembangunan,” kata Medrilizam. (\*)

# Dana Haji Jangan Sampai Untuk Mendanai Diskotik

Theresia Oktavina

Penulis

**K**omite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam mengelola dana masyarakat (calon jemaah haji) agar memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji Indonesia.

“Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan dana nilai manfaat perlu dilakukan secara ketat guna memastikan keberlanjutan program haji serta menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, dalam rapat kerja bersama BPKH, Senin (24/2/2025).

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menekankan pentingnya sistem pelayanan haji yang sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Erni Daryanti, berharap agar pelayanan yang diberikan BPKH, baik dalam pengelolaan dana haji maupun program kemaslahatan, dapat menjangkau



Pimpinan Komite III DPD RI bersama Kepala Badan BPKH Fadlul Imansyah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Menurut saya, perlu ada pertemuan antara BPKH dan pemerintah daerah untuk menghitung secara cermat besaran kuota biaya serta mengetahui bagian yang dapat disubsidi oleh pemda. Program pembangunan sarana ibadah dan pesantren juga harus diperluas ke daerah 3T, karena ini merupakan aspirasi masyarakat di daerah,” ujar Filep.

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Jelita Donal, menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan dana haji agar tidak disalahgunakan. “Jangan sampai dana BPKH yang ditempatkan di bank

justru digunakan untuk investasi yang tidak sesuai prinsip syariah. Dari dana haji, malah jadi dana diskotik. BPKH harus bermitra dengan bank yang memiliki kontrol syariah yang ketat,” tegasnya.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan bahwa peran BPKH dalam penyelenggaraan ibadah haji meliputi investasi untuk memperoleh nilai manfaat bagi jemaah, peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, optimalisasi rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), serta peningkatan nilai manfaat bagi kemaslahatan umat Islam di Indonesia. (\*)



# Raker Komite II - Kemeninves Bahas Investasi di Daerah

Betria Eriani

Penulis

**K**omite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Selasa (25/2/2025). Dalam rapat tersebut, Komite II DPD RI menyoroiti ketimpangan sektor investasi dan hilirisasi, yang hingga saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah lain belum mendapatkan alokasi yang optimal.

Selain itu, Komite II juga menyoroiti implementasi *Online Single Submission (OSS)*, sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah (pemda). “Faktanya, implementasi OSS masih menghadapi kendala, terutama di tingkat pemda,” ujar Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu. Padahal, sistem ini bertujuan memangkas waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha.

Anggota DPD RI asal Provinsi Bangka Belitung, Darmansyah Husein, mengungkapkan keheranannya karena masih banyak daerah yang belum memahami sistem OSS meskipun telah lama diluncurkan. “Banyak yang



Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu dan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menandatangani kesimpulan rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

mengeluh karena OSS tidak terintegrasi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Belum lagi tiba-tiba muncul perizinan dari pusat tanpa koordinasi. Ketika terjadi konflik, kami yang harus menghadapi. Ini perlu segera diselesaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual, menekankan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi merupakan garda terdepan dalam penerimaan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Ia mengingatkan agar investasi tidak merugikan masyarakat daerah. “Setiap negara butuh investasi, tetapi jangan sampai masyarakat dirugikan, misalnya dengan perampasan lahan oleh pengusaha. Kita harus sama-sama untung. Jangan sampai hanya pengusaha yang diuntungkan, sementara

masyarakat diadu domba dengan penegak hukum. Tolong ini diclearkan agar investasi kita bisa berkembang dengan sehat,” ujarnya.

Menanggapi masukan para senator, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki program *quick wins* pada tahun 2025. Salah satu program tersebut adalah peningkatan integrasi perizinan dasar di lima kementerian/lembaga ke dalam sistem OSS. “Kami juga akan meningkatkan integrasi sistem RDTR digital di daerah ke dalam OSS,” jelasnya.

Terkait pemerataan investasi di luar Jawa, ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tren peningkatan, terutama di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Investasi di luar Jawa bahkan mencapai Rp 895,4 triliun atau sekitar 52,2 persen dari total investasi nasional. (\*)

# Komite III Minta Menteri P2MI Tingkatkan Perlindungan PMI

Adhi Nugroho

Penulis

**K**omite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, pada Selasa (25/2/2025). Rapat ini membahas peningkatan perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Komite III DPD RI menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan hak serta kesejahteraan PMI, baik yang bekerja secara legal maupun ilegal. “Sebagai penyumbang devisa negara hingga Rp241 triliun, PMI harus mendapatkan perlindungan maksimal dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia,” ujar Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma.

Meskipun jumlah pengaduan PMI turun drastis hingga 22 persen—dari 1.923 kasus pada tahun 2023 menjadi 1.500 kasus di 2024—pemerintah tetap harus fokus menangani masalah utama yang masih sering terjadi. Beberapa permasalahan yang menonjol antara lain gaji yang tidak dibayar, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja sebelum kontrak berakhir, serta



Ketua Komite III DPD RI Filep Mawafma dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menandatangani kesimpulan rapat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

kasus PMI ilegal yang rentan menjadi korban eksploitasi. Beberapa di antaranya bahkan dipekerjakan sebagai operator penipuan digital atau *online scammer* di luar negeri.

Anggota DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahmad Syaui Soeratno, menegaskan bahwa penanganan PMI harus mencakup baik pekerja legal maupun ilegal melalui kolaborasi lintas kementerian. “Pemerintah perlu mendesain tenaga kerja terampil (*skilled labour*) bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan agar pekerja migran kita dapat mengisi peluang kerja di luar negeri dengan kompetensi yang lebih baik,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Menteri Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa penempatan PMI telah membantu menurunkan angka pengang-

guran sebesar 3,98 persen. Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar kasus pelanggaran hak pekerja migran dialami oleh mereka yang berangkat secara ilegal. “Sebanyak 90 hingga 95 persen pekerja migran yang mengalami kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang adalah mereka yang berangkat secara *unprocedural* atau tidak terdaftar. Sementara itu, pekerja migran yang terdaftar cenderung lebih aman dan tidak menghadapi masalah serupa,” jelasnya.

Untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI, Karding menyebutkan bahwa Kementerian P2MI telah menyiapkan tujuh program utama, termasuk penguatan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah serta pengembangan Desa Migran Emas sebagai bagian dari strategi perlindungan PMI di daerah asal mereka. (\*)



# Perlu Diintegrasikan Regulasi Tata Kelola Desa



Pimpinan dan anggota BULD DPD RI bersama mitra kerjanya usai melakukan rapat dengar pendapat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

## Fandi Tri Prayogo

Penulis

**B**ULD DPD RI mendorong diterbitkannya peraturan pelaksanaan undang-undang yang mengatur desa, dengan derivasi berupa peraturan pemerintah, agar terjadi sinkronisasi antara desa, supra desa, dan nasional. Sinkronisasi ini mencakup berbagai sistem tata kelola desa sebagai bagian dari sistem yang terintegrasi dengan berbagai regulasi, baik dalam perencanaan maupun pengawasan, termasuk sistem informasi desa.

Selama ini, sinkronisasi perencanaan pembangunan antara desa dan sektor belum optimal. Hal yang sama juga terjadi dalam perencanaan pembangunan antara sektor dan daerah. Dalam konteks

tata kelola pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa harus berbasis data,” kata Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah, Rabu (12/2/2025).

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad Pidana Bolombo menjelaskan bahwa pengaturan desa saat ini sudah cukup memadai karena memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada desa untuk mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat. Pengaturan tersebut mencakup kelembagaan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Meskipun demikian, sinkronisasi antara perencanaan

desa dan supra desa tetap diperlukan. Oleh karena itu, Kemendagri dan Kemendesa PDT melakukan sinkronisasi perencanaan desa dan supra desa di tingkat kabupaten dan nasional. Dibutuhkan bridging antara RPJMN dan RPJM Desa agar terjadi kesinambungan dalam perencanaan pembangunan.

Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dwi Rudi Hartoyo memastikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendesa PDT terus berkomunikasi dalam mengembangkan desa dan memberdayakan masyarakat desa.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Mardilzam menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan desa dalam perspektif perencanaan nasional telah dituangkan dalam RPJPN 2025-2045. Kebijakan perdesaan ini merupakan bagian dari 17 Arah Pembangunan Indonesia Emas Tahun 2045. (\*)

# BAP DPD RI Terima Aspirasi Masyarakat Adat Suku Aika

Rini Sumarni

Penulis

**B**adan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima aspirasi masyarakat adat Suku Aika dari Papua Tengah pada 26 Februari 2025. Mereka meminta perlindungan hukum atas dugaan pelanggaran HAM berupa tindak pidana terkait pengelolaan usaha pertambangan di Erstberg dan Freeport, yang menyebabkan pelepasan hak kepemilikan atas tanah ulayat mereka.

“Dokumen kepemilikan Suku Aika sudah dicocokkan dengan dokumen yang dipegang Pemerintah Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa Suku Aika adalah pemilik hak ulayat atas tanah yang menjadi wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia. Bukti kepemilikan ini sah secara internasional. Masalahnya, PT Freeport melakukan kesepakatan dengan Lemasa dan Lemasko, yang bukan pemilik hak ulayat sebenarnya, dengan menyatakan bahwa Suku Aika tidak ada,” jelas Ketua Lembaga Ulayat Aika, Mombiot Yoseph Akoha.

Menanggapi hal tersebut, Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim memahami harapan masyarakat adat Suku Aika. Ia



BAP DPD RI ketika menerima aspirasi masyarakat adat Suku Aika, Papua Tengah dan Paguyuban Pensiunan BRI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

menilai perlu ada pendekatan kepada pemerintah daerah agar eksistensi Suku Aika diakui di tanah Papua. Selain itu, BAP DPD RI juga akan melakukan upaya advokasi kepada pihak-pihak terkait di tingkat pusat.

Anggota BAP DPD RI asal Sumatera Utara, Pdt. Penrad Siagian, menilai bahwa upaya penghilangan suku asli sering terjadi, baik di Indonesia maupun di negara lain, karena alasan bisnis atau kepentingan tertentu. Terkait Suku Aika, ia menekankan pentingnya skema pengenalan keberadaan Suku Aika sebagai suku asli Papua Tengah agar pemerintah daerah dan pusat dapat mengakui serta memberikan hak-hak mereka, termasuk kepemilikan tanah ulayat.

“Ada yurisprudensi terkait penghilangan suku-suku di dunia, dan ini sudah menjadi hal yang sering terjadi. Masalah ini tidak mudah dise-

lesaikan dalam waktu singkat, apalagi jika ada keterlibatan negara dalam menghilangkan identitas Suku Aika. Oleh karena itu, pendekatan dari daerah perlu dilakukan untuk mendorong rekognisi dan pengakuan atas keberadaan mereka, yang selama ini tertimbun dalam kebijakan lokal. Selama Suku Aika tidak dianggap hadir dalam skala nasional, perjuangan ini akan sulit untuk membuahkan hasil,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, BAP DPD RI juga menerima aspirasi dari Paguyuban Pensiunan BRI. Mereka menghadapi kendala dalam memperjuangkan hak normatif, terutama terkait pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang belum diberikan oleh Direksi BRI sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (\*)

# Penerimaan dari PNBP Belum Sebanding dengan Potensi Daerah

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

**K**omite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (26/2/2025), dalam rangka Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menegaskan bahwa Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap PNBP nasional, khususnya dari sektor migas, minerba, dan kehutanan. Namun, realisasi penerimaan daerah dari PNBP dinilai belum sebanding dengan potensi yang ada.

“Kalimantan Timur selama ini menyumbang PNBP dalam jumlah besar, namun distribusinya masih belum optimal bagi pembangunan daerah. Kami ingin memastikan bahwa daerah penghasil mendapatkan manfaat yang adil dan proporsional,” ujar Ahmad Nawardi dalam pertemuan di Kantor Wali Kota Balikpapan yang di-



Kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Kalimantan Timur. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

hadiri Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji dan Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo.

Anggota Komite IV Habib Ali Alwi menyoroti permasalahan dalam mekanisme perhitungan dan alokasi PNBP bagi Kalimantan Timur. “Mari jadikan momentum tahun 2025 ini dalam mengawal aspirasi daerah untuk mendapatkan transparansi dalam mekanisme distribusi PNBP ke daerah,” ujar senator dari Provinsi Banten itu.

Komite IV DPD RI mencatat beberapa tantangan utama dalam pengelolaan PNBP di Kalimantan Timur. Antara lain ketergantungan pada sektor migas dan minerba. Sementara sektor lain seperti kehutanan dan

jasa belum dioptimalkan sebagai sumber PNBP, termasuk maksimalisasi PNBP dari tenaga kerja asing.

Kemudian kurangnya transparansi dalam mekanisme distribusi PNBP ke daerah. Dominasi pusat dalam pengelolaan PNBP, membuat daerah memiliki ruang terbatas dalam menentukan kebijakan. Kewenangan daerah yang terbatas, karena seluruh pengelolaan PNBP harus merujuk pada aturan pusat. Bagi hasil PNBP yang kurang optimal, sehingga daerah penghasil tidak mendapatkan manfaat yang cukup. Aturan daerah yang belum selaras dengan regulasi pusat, menyebabkan hambatan dalam implementasi kebijakan. (\*)

# Urgensi Perubahan UU PNBP Optimalisasi PNBP di Daerah

**Nanda Russia Rola**

Penulis

**K**omite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (25/2/2025), dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari para pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan UU PNBP di daerah, termasuk tantangan, kendala, dan peluang optimalisasi PNBP sebagai sumber pendapatan negara. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak terkait rencana perubahan regulasi guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan PNBP.

Koordinator Tim Kunjungan Kerja, Dwi Ajeng Sekar Respaty, menyampaikan harapannya agar seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, memberikan masukan terkait PNBP. Mengingat PNBP memiliki peran strategis dalam optimalisasi penerimaan daerah, DPD RI ingin memastikan bahwa regulasi yang ada dapat lebih mengako-



Kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Kepulauan Riau. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

modasi kepentingan daerah.

”Hasil dari kunjungan kerja ini akan menjadi bahan pendukung bagi Komite IV DPD RI dalam menginventarisasi materi muatan yang akan dimuat dalam RUU tentang Perubahan UU PNBP,” ungkap Senator asal Kepulauan Riau itu dalam pertemuan di Ruang Rapat Hang Nadim, Kantor Wali Kota Batam.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, menekankan bahwa revisi UU PNBP merupakan langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan fiskal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Ia menegaskan pentingnya menggali informasi mendalam terkait implementasi UU PNBP di daerah, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana kebijakan ini dapat lebih berpihak kepada daerah, terutama dalam hal distribusi dan pemanfaatan PNBP.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Gubernur Bidang Per-

ekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Luki Zaiman Prawira, mengangkat isu terkait dana bagi hasil. Menurutnya, Kepulauan Riau merupakan daerah penghasil perikanan, namun tidak mendapatkan bagi hasil yang seharusnya diterima.

”Semua dana bagi hasil perikanan lari ke pusat, padahal kami yang berkontribusi melalui APBD untuk mendorong sektor perikanan dengan memfasilitasi alat tangkap bagi nelayan. Total produksi perikanan budi daya di Kepri mencapai 27.436 ton. Jadi, kami mohon dukungan agar aspirasi Provinsi Kepri dapat ditindaklanjuti oleh Komite IV DPD RI,” ungkap Luki.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya DPD RI dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil bagi daerah penghasil, agar PNBP dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. (\*)

# Pelaksanaan UU Desa Masih Timbulkan Masalah

Lela Sa'diyah

Penulis

Pelaksanaan Undang-Undang (UU) tentang Desa masih menyisakan berbagai permasalahan, terutama terkait kapasitas aparat desa dalam mengimplementasikan regulasi tersebut. Lemahnya pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.

Kebijakan afirmasi yang besar terhadap desa memang diharapkan dapat menciptakan perubahan signifikan menuju kemandirian desa. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berisiko menimbulkan persoalan baru, terutama jika tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi antar instansi pemerintah.

“Beberapa persoalan antara lain lemahnya kapasitas aparat desa dalam mengimplementasikan UU Desa dan ketidakcakapan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban yang dapat menuju kepada penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara atau korupsi,” ujar Andi Sofyan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I dengan pakar pemerintahan desa,



Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI bersama pakar pemerintahan desa Sutoro Eko Yunanto. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sutoro Eko Yunanto, Senin (3/3/2025).

Selain itu, ketegangan antar-instansi pemerintah yang terlibat dalam pembinaan desa, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), turut memperlambat implementasi UU Desa. Perbedaan aturan turunan yang dibuat oleh masing-masing kementerian berpotensi menimbulkan gesekan yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sutoro Eko Yunanto menilai bahwa dalam pelaksanaannya selama 11 tahun terakhir, UU Desa masih didominasi pendekatan teknokratis yang justru menjadikan desa sebagai obyek regulasi, bukan subyek pembangunan. Menurutnya, semangat awal UU Desa untuk memberikan pengakuan dan kewenangan kepada desa mengalami

reduksi dan distorsi akibat birokrasi yang berlebihan.

“UU Desa seharusnya memberi ruang bagi desa untuk berdaulat, bukan justru membebani mereka dengan berbagai aturan teknis yang kaku. Saat ini, kepala desa lebih banyak berperan sebagai mandor proyek yang harus patuh pada regulasi pusat, alih-alih sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan penuh dalam membangun desa sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya,” tegas Sutoro.

Dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi, revisi kebijakan dan harmonisasi regulasi dinilai perlu dilakukan agar desa benar-benar dapat berkembang sesuai dengan semangat UU Desa. Pemerintah diharapkan dapat mengurangi pendekatan teknokratis yang terlalu sentralistik dan lebih memberikan ruang bagi desa dalam menentukan arah pembangunannya sendiri. (\*)

# Fokus Garda Terdepan Menjaga Kinerja DPD RI

Nanda Russia Rola

Penulis

**D**eputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lalu Niqman Zahir, mengharapkan Forum Komunikasi Staf (Fokus) Anggota DPD RI untuk turut serta membantu kerja-kerja kelembagaan DPD RI. Saat ini, DPD RI mendapatkan kepercayaan publik yang cukup tinggi dalam mengakselerasi kepentingan rakyat di daerah.

“Kepercayaan itu harus dijaga dan ditingkatkan melalui peran staf Anggota DPD RI. Saya berharap staf Anggota DPD RI menjadi salah satu garda terdepan penjaga kinerja DPD RI agar tetap konsisten mendapatkan kepercayaan tinggi dari rakyat,” kata Lalu saat menghadiri buka puasa bersama Fokus DPD RI, Kamis (13/3/2025).

Ketua Umum Fokus DPD RI, Adlan Nawawi, menyatakan bahwa kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim kali ini semakin bermakna dengan kehadiran jajaran Kesetjenan DPD RI. Hal itu semakin memperkuat kolaborasi semua pihak dalam meningkatkan kinerja staf Anggota DPD RI.



Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir bersama Staf Ahli Anggota DPD RI dalam kegiatan buka puasa bersama. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Peningkatan kinerja staf Anggota DPD RI tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kerja sama dari semua pihak, khususnya dengan Kesetjenan DPD RI. Kegiatan buka puasa ini diharapkan dapat mempererat hubungan antarsesama dan antarlembaga,” kata Adlan dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Adlan menyebutkan bahwa kegiatan bertajuk “Hilangkan Perbedaan, Rajut Kebersamaan, dan Jalin Ukhuwah Insaniyah” ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam mendukung kinerja kelembagaan DPD RI. Ramadan, menurutnya,

adalah waktu yang tepat untuk mengharmonisasi hubungan antarsesama.

Kegiatan buka puasa bersama ini dihadiri oleh ratusan staf ahli dan staf administrasi DPD RI serta jajaran Kesetjenan DPD RI. Dalam kesempatan tersebut, Fokus DPD RI juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga untuk menyediakan layanan kesehatan gratis. Ratusan staf dan jajaran Kesetjenan DPD RI turut melakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol guna memastikan kondisi kesehatan mereka tetap terjaga dengan baik. (\*)



# Almira Nabila Fauzi

Betria Eriani

Penulis

**A**lmira Nabila Fauzi adalah seorang politikus muda Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mewakili Provinsi Lampung untuk periode 2024–2029. Ia berhasil meraih 404.579 suara pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, yang menunjukkan kepercayaan besar dari masyarakat Lampung terhadap dirinya.

Lahir dari keluarga yang aktif dalam dunia politik dan pendidikan, Almira adalah putri sulung dari Dr. Fauzi, mantan Wakil Bupati Pringsewu periode 2017–2022 dan Rektor Institut Bisnis dan Niaga (IBN), serta Hj. Rita Irviani, M.M., yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Pringsewu periode 2019–2024. Lingkungan keluarga yang demikian memberikan pengaruh signifikan dalam membentuk karakter dan minat Almira di bidang politik dan pelayanan publik.

Dalam hal pendidikan, Almira memiliki latar belakang akademis yang kuat. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Sekolah Pelita Bangsa Bandar

Lampung. Kemudian, ia melanjutkan studi ke Monash College Australia, di mana ia meraih Diploma of Business dan Bachelor of Accounting. Tidak berhenti di situ, Almira juga menempuh pendidikan di Monash University Malaysia dan memperoleh gelar *Bachelor of Business and Commerce* pada tahun 2018. Saat ini, ia tengah menunggu sidang tesis untuk program S-2 di *London School of Public Relations (LSPR)*.

Selain kiprahnya di dunia politik, Almira juga aktif dalam berbagai organisasi. Ia menjabat sebagai Bendahara Yayasan Pendidikan Startech

Pringsewu, Ketua E-Sport Kabupaten Pringsewu, dan

Ketua Bidang Sepak Bola Wanita PSSI Pringsewu. Keterlibatannya dalam berbagai organisasi ini menunjukkan dedikasinya dalam memajukan sektor pendidikan, olahraga, dan pemberdayaan generasi muda di daerahnya.

Sebagai anggota DPD RI, Almira berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Lampung. Ia fokus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja. Dengan latar belakang pendidikannya di bidang bisnis dan akuntansi, Almira berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam memajukan sektor UMKM di Lampung.

Dalam menjalankan tugasnya, Almira aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislasi, pengawasan, dan penganggaran sesuai dengan kewenangan DPD RI. Ia juga menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Lampung dapat tersampaikan dan diperjuangkan di tingkat nasional. Dedikasi dan komitmennya diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Provinsi Lampung. (\*/berbagai sumber)



# Ahmad Syauqi Soeratno

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

**A**hmad Syauqi Soeratno adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2024–2029, mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada pemilihan umum legislatif 2024, ia berhasil meraih 398.903 suara, yang mengantarkannya menjadi senator DIY.

Lahir dari pasangan Drs. H. Mohamad Soeratno dan Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno, Syauqi tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai pendidikan dan keagamaan. Ibunya, Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno, adalah guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Aisyiyah periode 2000–2010.

Dalam hal pendidikan, Syauqi menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMP Negeri

5 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Yogyakarta. Ia kemudian melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada (UGM), meraih gelar Sarjana di Fakultas Teknologi Pertanian dan Magister Manajemen dengan spesialisasi *Strategic HR & Organization*. Saat ini, ia tengah menempuh program doktoral (S3) dalam bidang Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di UGM.

Syauqi aktif dalam berbagai organisasi, terutama di lingkungan Muhammadiyah. Ia pernah menjabat sebagai

Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat

Muhammadiyah (2015–2022) dan saat ini menjabat sebagai Bendahara Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2022–2027). Selain itu, ia juga terlibat dalam Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY sejak 2006.

Di bidang olahraga, Syauqi memiliki peran signifikan dalam persepak-bolaan Yogyakarta. Ia pernah menjabat sebagai General Manager PSIM Yogyakarta (2006–2007) dan Ketua Asosiasi Provinsi PSSI DIY (2019–2023). Keterlibatannya ini menunjukkan dedikasinya dalam memajukan olahraga, khususnya sepak bola, di wilayahnya.

Dalam kehidupan pribadi, Syauqi menikah dengan Satriana Rusly, SH., M.Kn. Kiprahnya yang luas dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, organisasi keagamaan, hingga olahraga, mencerminkan komitmennya dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. (\*/berbagai sumber)





# Tikuluak Minangkabau: *Mahkota Tradisi dan Simbol Kearifan Perempuan*

Betria Eriani

Penulis

**T**ikuluak atau tingkuluak merupakan salah satu jenis penutup kepala perempuan dalam budaya masyarakat Minangkabau. Penutup kepala ini terbuat dari kain selendang panjang yang kemudian dikreasikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan pemakainya serta fungsinya dalam adat. Tikuluak tidak sekadar menjadi bagian dari pakaian tradisional, tetapi juga mencerminkan nilai, identitas, serta peran perempuan dalam tatanan sosial dan adat Minangkabau.

Secara umum, tikuluak dapat dibedakan berdasarkan bentuk serta kain yang digunakan. Salah satu bentuk yang paling dikenal adalah tikuluak tanduak, yang menyerupai tanduk kerbau dengan kedua sisinya meruncing ke atas. Bentuk ini melambangkan keteguhan dan kebijaksanaan perempuan Minangkabau. Tikuluak tanduak biasanya dikenakan oleh anak-anak perempuan dalam tari adat atau oleh pengiring pengantin wanita saat prosesi pernikahan.

Selain itu, terdapat pula tikuluak yang memiliki ujung kain menjuntai dari bagian atas ke arah belakang, yang sering disebut sebagai tikuluak Bundo Kanduang. Bentuk ini lebih sering dipakai oleh perempuan dewasa dan biasanya digunakan dalam upacara adat



Ilustrasi Tikuluk Minang.

resmi. Tikuluak Bundo Kanduang memiliki makna simbolis sebagai bentuk kebesaran dan kehormatan perempuan Minangkabau yang memegang peranan penting dalam adat serta kehidupan bermasyarakat.

Di samping kedua jenis tersebut, ada juga tikuluak khas dari Koto Gadang, Kabupaten Agam, yang disebut tikuluak Koto Gadang. Tikuluak ini lebih sederhana dibandingkan bentuk lainnya, karena dibuat menyerupai selendang biasa yang dihiasi motif sulaman dan manik-manik khas Minangkabau. Tikuluak ini umumnya dikenakan oleh gadis-gadis dalam berbagai upacara adat dan sering kali mencerminkan keanggunan serta kecermatan perempuan dalam merangkai keindahan busana tradisional.

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk dan cara pemakaian tikuluak mengalami peruba-

han. Jika dahulu tikuluak hanya dikenakan dalam acara adat dan memiliki aturan tertentu dalam penggunaannya, kini tikuluak mulai dimodifikasi agar lebih sesuai dengan tren mode modern. Beberapa perancang busana Minangkabau mulai mengadaptasi bentuk tikuluak dalam gaya hijab kontemporer tanpa menghilangkan unsur khasnya.

Meskipun mengalami perkembangan, tikuluak tetap menjadi salah satu warisan budaya yang dijaga kelestariannya. Di berbagai daerah di Minangkabau, tikuluak masih dipakai dalam acara adat, pernikahan, dan pertunjukan seni budaya. Dengan terus berkembangnya minat generasi muda terhadap budaya tradisional, tikuluak tidak hanya bertahan sebagai simbol adat tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus hidup dalam masyarakat Minangkabau. (\*/Berbagai Sumber)

# Tikuluak Minangkabau: *The Crown of Tradition and Symbol of Women's Wisdom*

Betria Eriani

Writers

**T**ikuluak, or tingkuluak, is a type of women's head covering in Minangkabau culture. This head covering is made from a long shawl that is creatively shaped into various forms suitable to the wearer and its function in traditional customs. Tikuluak is not just a part of traditional attire, but it also reflects values, identity, and the role of women in Minangkabau social and customary tradition.

In general, tikuluak can be distinguished based on its shape and the fabric used. One of the most well-known forms is tikuluak tanduak, which resembles buffalo horns with both sides tapering upwards. This shape symbolizes the strength and wisdom of Minangkabau women. Tikuluak tanduak is usually worn by young girls in traditional dances or by female attendants during wedding ceremonies.

Additionally, there is a type of tikuluak whose hem draping from the top towards the back, commonly known as tikuluak Bundo Kandung. The form is more often worn by adult women and is typically used in formal customary ceremonies. Tikuluak Bundo



Illustration of Tikuluk Minangkabau. (Photo: Marawa Padang)

Kandung holds symbolic meaning as a representation of the greatness and honor of Minangkabau women, who play an essential role in tradition and community life.

Apart from these two types, there is also a distinctive tikuluak from Koto Gadang, Agam Regency, namely tikuluak Koto Gadang. It is simpler than the others, as it is shaped like an ordinary shawl adorned with embroidery patterns and typical Minangkabau beadwork. It is usually worn by virgins in various traditional ceremonies and often represents the elegance and meticulousness of Minangkabau women in crafting beautiful traditional attire.

As time progresses, the shape and usage of tikuluak have evolved. While in the past, tikuluak was worn

exclusively in traditional ceremonies and followed specific customary rules, today, tikuluak has been modified to align more with modern fashion trends. Some Minangkabau fashion designers begin to adapt the shape of tikuluak into contemporary hijab styles without losing its distinctive cultural characteristic.

Despite these changes, tikuluak remains a cultural heritage that is carefully preserved. In various regions of Minangkabau, tikuluak is still worn in traditional ceremonies, weddings, and cultural performances. With the growing interest of the younger generation toward traditional culture, tikuluak continues to endure not only as a customary symbol but also as an integral part of the Minangkabau cultural identity. (\*/Various Sources)



## Masjid Raya Makassar:

# Jejak Sejarah Islam di Sulawesi Selatan



Masjid Raya Makassar. (Foto Atourin)

**M Fathoni**

Penulis

**M**asjid Raya Makassar adalah masjid paling bersejarah di Kota Makassar dan menjadi salah satu ikon penting bagi umat Islam di Sulawesi Selatan. Dibangun pada tahun 1948 dan diresmikan pada tahun 1949, masjid ini berdiri megah di Jalan Masjid Raya, pusat kota Makassar. Sejak awal pembangunannya, masjid ini telah menjadi pusat aktivitas keagamaan dan sosial bagi masyarakat Makassar serta menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Islam di wilayah tersebut.

Arsitektur Masjid Raya Makassar menggabungkan gaya klasik dan modern, dengan desain yang menampilkan dominasi warna putih dan hijau yang mencer-

minkan ketenangan serta kesucian. Bagian dalamnya memiliki mihrab yang megah serta ukiran-ukiran kaligrafi yang indah, sementara kubah besar yang menjulang tinggi menjadi salah satu ciri khususnya. Luas masjid ini mencapai sekitar satu hektare dan mampu menampung ribuan jamaah, menjadikannya sebagai salah satu masjid terbesar di Sulawesi Selatan.

Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan, seperti pengajian, diskusi keislaman, hingga penyelenggaraan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Ramadan. Setiap hari, terutama pada waktu salat Jumat dan bulan suci Ramadan, Masjid Raya Makassar dipenuhi oleh ribuan jamaah yang datang dari berbagai penjuru kota

untuk melaksanakan ibadah bersama.

Selain memiliki nilai religius yang tinggi, Masjid Raya Makassar juga menyimpan nilai sejarah yang kuat. Masjid ini menjadi bagian dari perjuangan rakyat Makassar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh-tokoh Islam dan pemimpin daerah yang pernah berjuang dan berdakwah di masjid ini, menjadikannya sebagai pusat pergerakan dakwah Islam yang memiliki pengaruh luas di Sulawesi Selatan.

Seiring berjalannya waktu, Masjid Raya Makassar terus mengalami renovasi dan perluasan agar tetap nyaman bagi para jamaah. Meski mengalami beberapa perubahan fisik, masjid ini tetap mempertahankan keaslian nilai sejarah dan spiritualnya. Kini, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga destinasi wisata religi bagi wisatawan yang ingin mengenang lebih jauh tentang sejarah Islam di Makassar.

Dengan segala keagungan dan nilai historisnya, Masjid Raya Makassar tetap menjadi simbol kebanggaan umat Islam di Sulawesi Selatan. Keberadaannya yang telah bertahan selama puluhan tahun menunjukkan betapa pentingnya masjid ini dalam membangun peradaban Islam di Makassar serta mempererat hubungan masyarakat dalam bingkai keimanan dan ketakwaan.

(\*berbagai sumber)

# Makassar Grand Mosque: Tracing the History of Islam in South Sulawesi

M Fathoni

Written

**T**he Makassar Grand Mosque is the most historic mosque in Makassar and one of the most significant icons for Muslims in South Sulawesi. Built in 1948 and officially inaugurated in 1949, this grand mosque stands proudly on Masjid Raya Street, in the heart of Makassar. Since its establishment, it has served as a center for religious and social activities for the people of Makassar and has been a silent witness to the historical journey of Islam in the region.

The architecture of Makassar Grand Mosque blends classical and modern styles, featuring a dominant white and green color scheme that reflects serenity and purity. Its interior boasts a magnificent mihrab and beautifully carved calligraphy, while the towering-large dome remains one of its most distinctive features. Covering an area of approximately one hectare, the mosque can accommodate thousands of worshippers, making it one of the largest mosques in South Sulawesi.

Beyond serving as a place of worship, the mosque is also a hub for religious activities, such as Quranic studies, Islamic discussions, and ma-



Grand Mosque of Makassar. (Photo: Rumah123)

mor Islamic celebrations such as the Prophet Muhammad's Birthday (Maulid Nabi) and Ramadan observances. Every day, especially during Friday prayers and the holy month of Ramadan, the mosque is filled with thousands of worshippers from all corners of the city who gather to perform congregational prayer.

In addition to its high religious significance, Makassar Grand Mosque also holds great historical value. It played a crucial role in the struggle of the people of Makassar during Indonesia's struggle to keep its independence. Many Islamic scholars and local leaders have ever struggled and performed dakwah (Islamic preaching) in this mosque, making it a center for Islamic movements with a broad influence throughout South Sulawesi.

Over time, the mosque has undergone several renovations and expansions to ensure the comfort of the worshippers. Despite physical modifications, it has maintained its historical and spiritual authenticity. Today, the mosque does not only serve as a place of worship, but it is also a religious tourism destination for visitors eager to learn more about the history of Islam in Makassar.

With its grandeur and historical significance, the Makassar Grand Mosque remains a symbol of pride for Muslims in South Sulawesi. Its enduring presence for decades highlights its crucial role in shaping Islamic civilization in Makassar and strengthening the bonds of faith and devotion among the people.

(\* / Various Sources)



## Masjid Agung Banten: Keagungan Sejarah Islam di Tanah Jawara



Masjid Agung, Banten. (Foto Travel Kompas)

**Adhi Nugroho**

Penulis

**M**asjid Agung Banten merupakan salah satu masjid paling bersejarah di Indonesia dan menjadi ikon penting di Provinsi Banten. Masjid ini dibangun pada tahun 1566 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati, yang merupakan pendiri Kesultanan Banten. Sebagai salah satu masjid tertua di Nusantara, Masjid Agung Banten tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol kejayaan Islam dan pusat penyebaran agama Islam di wilayah Banten dan sekitarnya.

Arsitektur Masjid Agung Banten sangat unik karena merupakan perpaduan berbagai gaya, seperti Jawa, Tiongkok, Belanda, dan Timur Te-

ngah. Salah satu ciri khas yang menonjol adalah menaranya yang setinggi sekitar 24 meter, berbentuk seperti mercusuar, dan dibangun oleh seorang arsitek asal Belanda bernama Hendrik Lucasz Cardeel. Dari atas menara ini, pengunjung dapat melihat pemandangan sekitar kawasan Banten Lama, yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten.

Selain menara, bagian atap utama masjid juga memiliki keunikan tersendiri karena berbentuk tumpang lima yang menyerupai pagoda, sebuah pengaruh dari arsitektur Tiongkok. Di dalam masjid, terdapat mihrab dan mimbar yang masih asli sejak zaman kesultanan, serta beberapa makam sultan dan tokoh penting Kesultanan Banten. Makam Sultan Maulana

Hasanuddin beserta keluarganya yang berada di kompleks masjid menjadi salah satu daya tarik utama bagi peziarah yang datang dari berbagai daerah.

Setiap hari, Masjid Agung Banten ramai dikunjungi oleh jamaah dan wisatawan, terutama pada hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Idul Fitri, dan Idul Adha. Selain beribadah, para pengunjung juga datang untuk berziarah ke makam para sultan dan ulama yang berjasa dalam menyebarkan Islam di Banten. Tradisi ziarah ini telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Banten yang masih lestari hingga saat ini.

Selain sebagai pusat keagamaan, Masjid Agung Banten juga menjadi destinasi wisata sejarah yang menarik. Pemerintah dan masyarakat setempat terus berupaya merawat dan menjaga keaslian bangunan masjid serta kawasan sekitarnya. Berbagai upaya renovasi dilakukan tanpa menghilangkan nilai historisnya, sehingga masjid ini tetap berdiri kokoh sebagai saksi perjalanan panjang Islam di tanah Banten.

Dengan nilai sejarah, keunikan arsitektur, dan keberadaannya sebagai pusat spiritual, Masjid Agung Banten tetap menjadi salah satu masjid paling banyak dikunjungi di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Banten, tetapi juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan peradaban Islam di Nusantara.

(\*berbagai sumber)

# The Grand Mosque of Banten: The Majesty of Islamic History in the Land of Jawara



Great Mosque of Banten. (Photo: Travel Kompas)

**Adhi Nugroho**

Written

**T**he Grand Mosque of Banten is one of the most historic mosques in Indonesia and an important icon in Banten Province. It was built in 1566 by Sultan Maulana Hasanuddin, the son of Sunan Gunung Jati, who was the founder of the Banten Sultanate. Being one of the oldest mosques in the archipelago, it is more than just a place of worship as the Grand Mosque of Banten symbolizes the golden age of Islam and serves as a central hub for the spreading of Islam in Banten and its surrounding regions.

The architecture of the Grand Mosque of Banten is unique as it blends various styles, including Javanese, Chinese, Dutch,

and Middle Eastern influences. One of its most distinctive features is the approximately 24-meter height tower, which resembles a lighthouse. This tower was designed by a Dutch architect named Hendrik Lucasz Cardeel. From the top of the tower, visitors can enjoy a panoramic view of the surrounding old Banten area, which was once the center of the Banten Sultanate's government.

Apart from the tower, the mosque's main roof also has a unique characteristic, as it is built in a five-tiered pagoda-like structure, reflecting Chinese architectural influences. Inside the mosque, the mihrab and pulpit remain in their original form since the sultanate era, including the tombs of Sultan Maulana Hasanuddin and

other prominent figures of the Banten Sultanate. The tombs of the Sultan and the family have become a major attraction for pilgrims who travel from various regions to visit the site.

Every day, the Great Mosque of Banten is filled with worshippers and tourists, especially during Islamic holidays such as the Prophet's Birthday (Maulid Nabi), Eid al-Fitr, and Eid al-Adha. In addition to praying, visitors come to pay their respects at the tombs of sultans and scholars who played significant roles in spreading Islam in Banten. The pilgrimage tradition has continued for centuries and remains an integral part of Banten's cultural heritage.

Beyond being a religious center, the Grand Mosque of Banten is also a fascinating historical tourist destination. The local government and community continuously strive to preserve the authenticity of the mosque's structure and its surrounding areas. Various renovation efforts have been undertaken without altering its historical values, ensuring that this mosque remains a strong testimony to the long-standing Islamic presence in Banten.

With its historical significance, unique architecture and its existence as a spiritual center, the Grand Mosque of Banten remains one of the most visited mosques in Indonesia. Its existence is not only a source of pride of the people of Banten but it also an essential part of the cultural and Islamic heritage of the Indonesian archipelago.

(\* / Various Sources)



## Kebersamaan Ramadan di Masjid Jogokariyan: Tradisi Takjil yang Menghangatkan



Umat muslim menerima makanan gratis untuk berbuka puasa selama Ramadan di Masjid Jogokariyan di Yogyakarta, pada 2 Maret 2025. (Foto Devi Rahman/AFP)

**Lela Sa'diyah**

Penulis

**M**asjid Jogokariyan di Yogyakarta dikenal sebagai salah satu masjid yang memiliki kegiatan sosial dan dakwah yang aktif, terutama saat bulan Ramadan. Salah satu tradisi yang paling dinantikan di masjid ini adalah pembagian takjil gratis bagi jamaah dan masyarakat sekitar. Setiap sore menjelang berbuka puasa, 3.000 porsi takjil disiapkan untuk dibagikan kepada siapa saja yang datang ke masjid, tanpa memandang latar belakang mereka. Tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial, tetapi juga mencerminkan semangat berbagi yang tinggi di bulan suci.

Yang membuat tradisi takjil di Masjid Jogokariyan istimewa adalah keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Donasi dari para jamaah dan warga sekitar

digunakan untuk menyiapkan hidangan berbuka yang berkualitas dan bernutrisi. Relawan dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang tua, bahu-membahu memasak, mengemas, dan membagikan takjil. Hal ini menciptakan suasana kebersamaan yang erat dan memperkuat rasa persaudaraan di antara sesama muslim.

Setiap harinya, menu takjil yang disediakan bervariasi, mulai dari kurma, kolak, bubur sumsum, hingga makanan berat seperti nasi dan lauk-pauk. Tidak hanya itu, masjid ini juga menyediakan ribuan porsi makan malam gratis bagi jamaah yang ingin melanjutkan buka puasa dengan santapan yang lebih lengkap. Konsepnya adalah "Siapa yang datang, maka ia berhak makan," sehingga setiap orang yang hadir bisa merasakan manfaat dari keberkahan Ramadan tanpa harus merasa sungkan atau terbebani.

Keunikan lain dari pembagian takjil di Masjid Jogokariyan adalah sistem manajemen keuangannya yang transparan dan berbasis kebermanfaatan maksimal. Dana infaq yang terkumpul dari jamaah tidak hanya digunakan untuk kegiatan masjid, tetapi juga dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk makanan berbuka, bantuan sosial, dan program-program dakwah lainnya. Hal ini membuat masjid ini dijuluki sebagai "Masjid Nol Saldo," karena selalu memastikan dana yang ada digunakan untuk kepentingan umat tanpa menumpuk saldo yang tidak terpakai.

Suasana menjelang berbuka di masjid ini sangat meriah. Ribuan orang berkumpul di halaman dan dalam masjid, duduk bersama di atas tikar panjang sambil menunggu adzan Maghrib berkumandang. Tidak hanya warga lokal, tetapi juga mahasiswa, wisatawan, bahkan warga dari luar kota datang untuk merasakan kebersamaan yang hangat di sini. Momen berbuka puasa di Masjid Jogokariyan bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang rasa persaudaraan, keikhlasan dalam berbagi, dan kebersamaan yang mempererat ukhuwah Islamiyah. Tradisi pembagian takjil di Masjid Jogokariyan menjadi inspirasi bagi banyak masjid lain di Indonesia untuk mengadakan kegiatan serupa. (\*/berbagai sumber)

## Ramadan Gathering at Jogokariyan Mosque: A Heartwarming Takjil Tradition



The atmosphere of the iftar gathering at Jokokariyan Mosque, Yogyakarta. (Photo: Travel Kompas)

**Lela Sa'diyah**

Written

**J**ogokariyan Mosque in Yogyakarta is known for its active social and dakwah (Islamic preaching) activities, especially during the holy month of Ramadan. One of the most anticipated traditions at this mosque is the distribution of free takjil (light iftar meals) to worshippers and the surrounding community. Every evening on approaching iftar, 3,000 portions of takjil are prepared and distributed to anyone who comes to the mosque, regardless of their background. This tradition is not only an expression of social care, but it also is a reflection of the strong spirit of sharing during the sacred month.

What makes the takjil tradition at Jogokariyan Mosque

special is the active involvement of the community in its execution. Donations from worshippers and local residents are used to prepare nutritious and high-quality iftar meals. Volunteers from various backgrounds, from young people to the elderly, work hand in hand to cook, package, and distribute the takjil. This creates a deep sense of fellowship and strengthens the bond of brotherhood among Muslims.

Every day, the takjil menu varies, including dates, kolak (sweet banana and coconut milk dessert), bubur sumsum (rice flour porridge), and even full meals like rice with accompanying dishes. Additionally, the mosque provides thousands of free dinner portions for those who wish to continue their iftar with a more complete meal.

The concept is simple: “Whoever comes is entitled to eat, so that everyone coming can benefit from Ramadan’s blessings without any reluctance or reservation.

Another unique aspect of Jogokariyan Mosque’s takjil distribution is its transparent financial management system, basing on maximum benefit for the community. Donations collected from worshippers are not only used for mosque activities, but they are also returned to the people in the form of iftar meals, social aid, and other dakwah programs. This approach has earned the mosque the nickname “Zero Balance Mosque,” as it always ensures that all available funds are utilized for the welfare of the ummah without accumulating unused balances.

The atmosphere prior to iftar at the mosque is lively and heartwarming. Thousands of people gather in the mosque’s courtyard and prayer hall, sitting together on long mats while waiting for the Maghrib call to prayer. It’s not just local residents—students, tourists, and even visitors from outside the city come to experience this warm sense of togetherness. The iftar moment at Jogokariyan Mosque is not just about food; it is about brotherhood, sincerity in sharing and fellowship to strengthen the bond of unity in faith. The takjil tradition at Jogokariyan Mosque has inspired many other mosques in Indonesia to organize similar programs.

(\* / Various Sources)



Kemeriahan Penjualan Takjil di Kramat Sentiong:

# Ragam Hidangan dan Antusiasme Pembeli



Penjual takjil di Kramat Sentiong, Jakarta (Foto Viva)

**Hestiana Kiftia Sari**

Penulis

**K**awasan Kramat Sentiong di Jakarta Pusat menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga yang ingin berburu takjil saat bulan Ramadan. Setiap sore menjelang waktu berbuka puasa, area ini dipenuhi oleh deretan pedagang yang menjajakan berbagai hidangan pembuka. Suasana ramai dengan lalu lalang pembeli menciptakan atmosfer khas Ramadan yang penuh semangat dan kebersamaan.

Para pedagang di Kramat Sentiong menawarkan beragam jenis takjil yang meng-

gugah selera. Mulai dari aneka gorengan seperti bakwan, risoles, dan pastel, hingga kudapan manis seperti kolak pisang, bubur sumsum, dan es cendol. Selain itu, tersedia juga hidangan khas daerah seperti bubur jagung khas Aceh dan lupis ketan, yang menambah kekayaan kuliner di kawasan ini.

Selain takjil tradisional, terdapat pula inovasi kuliner modern yang menarik perhatian. Misalnya, mochi dengan berbagai isian dan donat lumer yang tengah populer di kalangan pembeli muda. Kehadiran kudapan-kudapan ini menunjukkan kreativitas para pedagang dalam me-

enuhi selera pasar yang beragam.

Antusiasme pembeli di Kramat Sentiong sangat tinggi. Mereka datang dari berbagai penjuru Jakarta untuk menikmati ragam takjil yang ditawarkan. Tidak hanya warga setempat, tetapi juga para pekerja kantor dan mahasiswa yang ingin merasakan suasana berbuka puasa di tengah keramaian. Harga yang terjangkau dan pilihan menu yang beragam menjadi daya tarik utama bagi para pembeli.

Proses transaksi antara penjual dan pembeli berlangsung dengan lancar dan penuh keakraban. Para pedagang melayani dengan ramah, sementara pembeli dengan sabar menunggu giliran untuk mendapatkan takjil favorit mereka. Beberapa pedagang bahkan menerima pesanan dalam jumlah besar untuk acara buka puasa bersama, menunjukkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap kualitas hidangan yang disajikan.

Secara keseluruhan, penjualan takjil di Kramat Sentiong tidak hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi dan perayaan budaya kuliner Indonesia. Kehadiran berbagai hidangan dari berbagai daerah mencerminkan keragaman dan kekayaan tradisi kuliner nusantara, yang semakin memperkaya pengalaman Ramadan bagi masyarakat Jakarta.

(\*berbagai sumber)

**The Excitement of Takjil Market at Kramat Sentiong:**

# A Variety of Dishes and Enthusiastic Buyers



The atmosphere of Nasi Kapau Minang vendors in Kramat Sentiong. (Photo: Kompas.com)

**Hestiana Kiftia Sari**

Author

**K**ramat Sentiong in Central Jakarta is one of the favourite destinations for residents looking for takjil (light iftar meals) during Ramadan. Every afternoon approaching to iftar, this area becomes bustling with rows of vendors selling various appetizers. The lively atmosphere, with people moving around, creates a unique Ramadan spirit filled with enthusiasm and togetherness.

Vendors at Kramat Sentiong offer a wide array of

tempting takjil. From assorted fried snacks such as bakwan (vegetable fritters), risoles (stuffed fried pastry), and pastel (fried pastry with savory fillings), to sweet snacks like kolak pisang (banana in coconut milk dessert), bubur sumsum (rice flour porridge), and es cendol (iced sweet drink with green rice flour jelly). Additionally, the market features regional specialties, such as Acehese corn porridge and lupis ketan (sticky rice cake with palm sugar syrup), enriching the culinary delights of the area.

Beside traditional takjil,

modern culinary innovations also attract attention. For instance, there are mochi with various fillings and melting doughnuts, which are currently popular among younger buyers. These creative snacks reflect the creativity of vendors in responding to diverse market preferences.

The enthusiasm of buyers at Kramat Sentiong is remarkably high. People from all corners of Jakarta visit to enjoy variety of the offered takjil. It is not only local residents but also office workers and university students who want to experience the vibrant iftar atmosphere. The affordable prices and wide range of menu options become the primary attraction for most buyers.

The buying and selling process is smooth and very friendly. Vendors serve customers amiably, while buyers patiently wait for their turn to get their favorite takjil. Some vendors even receive large orders for group iftar gatherings which demonstrate customers' trust and satisfaction with the quality of the food offered.

Overall, the takjil market at Kramat Sentiong is not just an economic activity but it is also a performance for a social and Indonesian culinary festival. The presence of various dishes from different regions reflects Indonesia's rich culinary traditions, further enriching the Ramadan experience for the people of Jakarta. (\*various sources)



# Pelantikan Kepala Daerah dan Prinsip Pemerintahan Bertingkat

Oleh:

Prof. Djohermansyah Djohan/Pakar Otonomi Daerah dan Guru Besar IPDN

Tanggal 20 Februari 2025 sejarah baru terukir di dunia pemda, mungkin bisa masuk rekor MURI. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak 27 November 2024 dilantik serentak pula secara terpusat oleh Presiden Prabowo di Jakarta. Jumlahnya 962 orang. Kecuali, bagi 40 daerah yang masih belum selesai sengketanya di Mahkamah Konstitusi (MK) yang pelantikannya disusul kemudian.

Selain itu, bagi Provinsi Aceh, pelantikan gubernur dan wakilnya dilaksanakan tidak terpusat, tapi oleh Mendagri di ibu kota provinsi, dan kepala daerah kabupaten/kotanya dilantik oleh gubernur di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah dalam rapat paripurna DPR Kabupaten/Kota mengikuti aturan khusus sesuai UU Pemerintahan Aceh No.11 Tahun 2006 yang merupakan tindak lanjut dari MoU Helsinki (Perdamaian Aceh).

Bagaimanakah sebetulnya penyelenggaraan pelantikan pemimpin pemda dari Sabang sampai Merauke yang afdhol sesuai semangat otonomi daerah kita yang mengadopsi sistem pilkada langsung secara serentak



di provinsi maupun kabupaten/kota? Mari kita coba menyiginya.

Dalam sistem otonomi daerah bertingkat (*multi-level government*), apa lagi dengan corak sistem prefektur terintegrasi atau gubernur di samping sebagai kepala daerah otonom provinsi juga merangkap posisi sebagai wakil pemerintahan pusat (*dual-roles*), maka pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bupati/walikota agar punya kapasitas dan terhindar dari penyimpangan dalam melaksanakan UU.

Guna membuat gubernur berwibawa, lebih-lebih mereka sama-sama dipilih langsung dan bantuan

keuangan provinsi kepada kabupaten/kota kecil pula, pelantikan bupati/walikota sudah tepat jika dilakukan oleh gubernur. Tradisi ini sudah diterapkan sejak zaman Pak Harto. Biasanya sebelum diambil sumpah/janji jabatan, pejabat yang melantik mengucapkan kalimat penting, yaitu: “ikuti kata-kata saya”, yang bisa dimaknai patuhlah kepada saya (baca: gubernur!).

Bila pelantikan bupati/walikota diambil alih oleh presiden, dan pelantikan mereka sama-sama pula oleh presiden, bupati/walikota makin kurang respectnya pada gubernur, sehingga konflik bupati/walikota vs gubernur yang kerap terjadi selama ini akan makin menjadi.

Jangan heran bila nanti makin ramai bupati/walikota yang berani mengusir gubernur bila berkunjung ke wilayah administratifnya. Jangan heran pula bila nanti ada gubernur yang tidak mau membantu walikota membangun ibu kota provinsi tempat gubernur berdomisili.

Jadi, pelantikan semua kepala daerah ini tanpa pandang bulu oleh presiden menyalahi prinsip peme-



©2025 Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

rintahan bertingkat, dan bakal berdampak terhadap koordinasi, pembinaan dan pengawasan provinsi terhadap kabupaten/kota yang akan merugikan pemerintah pusat sendiri.

Secara yuridis, pelantikan semua kepala daerah hasil pilkada serentak nasional oleh presiden juga mengandung polemik. Karena, pasal 164 B UU Pilkada No.10 Tahun 2016 memang membolehkan presiden melantik semua kepala daerah tapi itu bersifat opsional, karena ada kata “dapat” melantik.

Sedangkan dalam Pasal 163 dan 164 UU tersebut, secara eksplisit dinyatakan gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilantik oleh gubernur di

ibu kota provinsi. Tak wajib presiden yang melantik pimpinan pemda kabupaten/kota, karena tugas itu jelas ditegaskan “*by law*” ada di pundak gubernur. Namun, bila gubernur berhalangan, pelantikan diambil-alih oleh Mendagri, dan kalau Mendagri berhalangan pula, barulah di-*take over* oleh presiden.

Dari sisi kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah melalui Inpres No.1 Tahun 2025 yang membatasi kegiatan seremonial, pelantikan serentak dengan upacara besar dihadiri ribuan orang di ibu kota negara, agaknya juga paradoks. Ongkos pesawat terbang dan sewa hotel kepala daerah beserta rombongan yang tak kecil pasti akan menelan biaya besar. Apa lagi mereka harus sehari-hari tinggal

di Jakarta menjalani cek kesehatan dan gladi upacara lebih dahulu. Belum lagi sesudah pelantikan harus mengikuti “retreat” atau orientasi kepemimpinan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah selama seminggu.

Ke depan, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang perkaranya belum putus di MK seyogianya diselenggarakan kembali bertingkat, presiden melantik gubernur dan wakil gubernur di ibu kota negara, dan gubernur melantik bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di ibu kota provinsi.

Jika memungkinkan gubernur sebaiknya melantik mereka di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan. (\*artikel ini sudah dimuat di PATRONNEWS 19 February 2025)



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI  
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

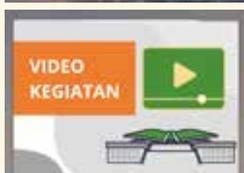
Selamat Hari Raya

# Idul Fitri

**1 Syawal 1446 H**

Semoga keberkahan dan kedamaian menyertai setiap langkah kita di Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir & batin.

**31 Maret 2025**



## MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

